



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2025



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kata Pengantar..

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal selama tahun 2025. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memotret capaian kinerja secara objektif, baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta sebagai dasar evaluasi kinerja untuk capaian yang lebih baik ditahun berikutnya.

Sebagai unit pendukung utama, Sekretariat Jenderal memegang peran strategis dalam memastikan kelancaran administrasi, perumusan kebijakan internal serta pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini tidak lepas dari kerja sama dan sinergi seluruh unit kerja di bawah koordinasi.

Kami menyadari masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyusunan laporan ini. Karena itu, kami sangat terbuka dalam segala bentuk kritik dan masukan yang konstruktif dalam peningkatan kualitas kerja di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal atas dedikasi, kerja keras dan komitmen dalam pencapaian kinerja tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.



Nico Afinta
Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum



PROFIL



**RISMAN
SOMANTRI**

Kepala Biro
Umum

**ITUN
WARDATUL**

Kepala Biro
BMN

**FAJAR
TAMAN**

Kepala Biro
SDM

**NICO
AFINTA**

Sekretaris
Jenderal

**RAHMI
WIDHIYANTI**

Kepala Biro
Perencanaan
dan
Organisasi

**SRI
YUSFINI**

Kepala Biro
Keuangan

**RONALD
LUMBUUN**

Kepala Biro
Hukerma

**RIFQI
ADRIAN**

Kepala
Pusdatin

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 1 TAHUN 2024, SEKRETARIAT JENDERAL MEMPUYAI TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI BERIKUT

Tugas: Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian; koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian;
3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
5. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pelayanan pengadaan barang / jasa; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga merupakan pengamalan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain pedoman diatas, dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja, laporan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetap terus dipedomani ditengah transisi dan dinamika perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum.

Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Sekretariat Jenderal untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum, baik yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2020 – 2024 maupun Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025. Penetapan Rencana Strategis ini berdampak pada Perjanjian Kinerja untuk seluruh jajaran dikarenakan akan berpengaruh langsung pada pengukuran capaian kinerja sebelum penetapan maupun sesudah penetapan Rencana Strategis di sepanjang Tahun 2025 dengan gambaran terkait perubahan sebagai berikut:

Renstra Tahun 2020 – 2024 Perjanjian Kinerja Tanggal 07 Januari 2025 1 SP -> 2 IKK			Renstra Tahun 2025 – 2029 Perjanjian Kinerja Tanggal 23 Oktober 2025 1 SP -> 1 IKP		
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38
	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3			

Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal yaitu Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena belum terbitnya hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga. Namun Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024 sebesar 90,38 yang mengalami peningkatan sebesar 6,75 poin dari tahun 2023 sebesar 83,63.



Penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal yang kurang optimal tidak menjadi faktor utama pendukung tidak tercapainya Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal dan Pelaksanaan Tugas Fungsi lainnya sepanjang Tahun 2025 dibuktikan dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) data per 10 Januari 2026 sebesar 94,66. Capaian anggaran 77,92% disebabkan karena pagu belanja pegawai yang berlebih. Besarnya pagu belanja pegawai tersebut diakibatkan pada tahun 2025 pagu belanja pegawai Kementerian Hukum masih disusun berdasarkan kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Biro dan Kepala Pusdatin tanggal 07 Januari Tahun 2025, terdapat 13 Sasaran Kegiatan dengan 35 Indikator Kinerja Kegiatan dimana 28 Indikator Kinerja Kegiatan memperoleh nilai capaian > 100%, sedangkan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Biro dan Kepala Pusdatin tanggal 23 Oktober Tahun 2025, terdapat 14 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Kegiatan dimana 15 Indikator Kinerja Kegiatan memperoleh nilai capaian > 100%.

Capaian secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Biro Perencanaan dan Organisasi					
Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Kementerian Hukum	1. Nilai SAKIP Kementerian Hukum	BB	n/a	n/a	Evaluasi SAKIP K/L dilaksanakan pada akhir tahun oleh KemenPAN-RB sehingga capaian belum dapat dilakukan perhitungan
	2. Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum	80%	100%	125%	Tercapai
Meningkatnya Kinerja Anggaran Satuan Kerja Kementerian Hukum	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Hukum	97	98,86	101,92%	Tercapai (Penilaian IPPL K/L dilaksanakan pada akhir tahun oleh Bappenas sehingga capaian belum dapat dilakukan perhitungan)
	2. Rata-rata Capaian Kinerja Satuan Kerja Kementerian Hukum (SMART)	95	n/a	n/a	Nilai SMART belum dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan



Meningkatnya Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Efektivitas Organisasi Kementerian Hukum	1. Indeks Pelayanan Publik	4,52	4,58	101%	Tercapai
	2. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	82,5	n/a	n/a	Penilaian dilaksanakan setiap Bulan November oleh Ombudsman sehingga sd 23 Januari 2026 hasil evaluasi IPP K/L belum ada
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum serta Layanan Internal Biro Perencanaan	1. Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan	80%	100%	125%	Tercapai
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Perencanaan	3,1	3,81	122,90%	Tercapai
Biro Sumber Daya Manusia					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN Kementerian Hukum serta Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia	1. Indeks Merit Sistem	380	n/a	n/a	Telah dilaksanakan progress pemenuhan data dukung sesuai dengan aspek yang dibutuhkan pada aplikasi, dan progress data dukung yang telah diupload 100% dengan status Sudah Diisi NB: KASN Tidak melaksanakan Penilaian pada





Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN Kementerian Hukum serta Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia	1. Indeks Profesionalitas ASN	65	86,73	133,43%	Tercapai
	2. Indeks Kepuasan Kerja ASN Kemenkumham	3,1	3,75	120,97%	Tercapai
	3. Indeks Kepuasan UKE I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia	3,1	3,75	120,97%	Tercapai
Biro Keuangan					
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum	1. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum	WTP	WTP	100%	Tercapai
	2. Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro	3,1	3,87	124,83%	Tercapai
	3. Indikator Kualitas Pengelolaan Anggaran	96	94,66	98,60%	Tidak Tercapai Masih terdapat Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi faktor pengurang Nilai





Biro Barang Milik Negara					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara serta Pengadaan Barang dan Jasa	1. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap layanan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	3,1	3,87	124,83%	Tercapai NB: Tidak Dimunculkan kembali, Penyesuaian Perjanjian Kinerja Kepala Biro terhadap Renstra Periode 2025-2029
	2. Nilai Kualitas Pengelolaan Asset	3,30	n/a	n/a	Hasil penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dari Kementerian keuangan akan diumumkan bulan Februari tahun 2026 NB: Penyesuaian Nama menjadi Indeks Pengelolaan
	3. Nilai Tata Kelola Pengadaan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Tercapai NB: Penyesuaian Nama menjadi Indeks Tata Kelola Pengadaan oleh LKPP
	4. Persentase Pengendalian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	95%	69,97%	73,65%	Tidak Tercapai NB: Tidak Dimunculkan kembali, Penyesuaian Perjanjian Kinerja Kepala Biro terhadap Renstra Periode 2025-2029





Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama

Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum	1. Persentase Sentimen Positif terhadap Total Sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Tercapai
	2. Indeks Kepuasan UKE I dan Kewilayahan terhadap Layanan Administrasi Kerja Sama	3,1	3,86	124,52%	Tercapai
	3. Persentase Layanan Advokasi Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permintaan	100%	100%	100%	Tercapai
	4. Persentase Layanan Advokasi Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permintaan	100%	100%	100%	Tercapai
	5. Persentase Putusan Perkara yang Dimenangkan	85%	100%	117,65%	Tercapai
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Menteri Hukum	1. Persentase Usulan Peraturan Menteri Hukum yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	Tercapai





Biro Umum					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	1. Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip	A (Nilai 85)	AA (Nilai 93,22)	109,67%	Tercapai
Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, Protokol dan Pengamanan, serta Layanan Internal Sekretariat Jenderal	1. Persentase Layanan Tata Usaha Pimpinan yang Diselesaikan	100%	100%	100%	Tercapai
	2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap Layanan Rumah Tangga	3,1	3,57	115,16%	Tercapai
	3. Persentase Layanan Tata Usaha yang Diselesaikan	100%	100%	100%	Tercapai
	4. Indeks Kepuasan Layanan Pengamanan Lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,1	3,81	122,90%	Tercapai
	5. Persentase Layanan protokol yang Diselesaikan	100%	100%	100%	Tercapai
	6. Indeks Kepuasan Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap Layanan Internal di Lingkungan Sekretariat Jenderal	3,1	3,62	116,77%	Tercapai





Pusat Data dan Teknologi Informasi					
Meningkatnya Implementasi SPBE di lingkup Kementerian Hukum dan Kepuasan terhadap Layanan Pusdatin	1. Nilai SPBE Kementerian Hukum	Memuaskan	Memuaskan	100%	Tercapai
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Pusdatin	1. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1	3,84	123,87%	Tercapai
	2. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup	100%	100%	100%	Tercapai

Walau ditengah perubahan, kesuksesan capaian program Sekretariat Jenderal tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan Sasaran Kegiatan yang didukung dari 6 (enam) Biro dan 1 (satu) Pusat Data dan Teknologi Informasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing masing pada akhir Tahun 2025 sesudah penetapan Rencana Strategis 2025 – 2029 dengan penambahan 1 Sasaran Kegiatan menjadi 12 dan pengurangan 11 Indikator Kinerja Kegiatan menjadi 21 dimana 15 Indikator Kinerja Kegiatan mendapat nilai capaian >100% sebagaimana berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Biro Perencanaan dan Organisasi					
Meningkatnya Implementasi SAKIP Kementerian Hukum	1. Nilai SAKIP Kementerian Hukum	78,32 (BB)	n/a	n/a	Hasil belum diterbitkan Kementerian PANRB





Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan Agile	1. Nilai Indeks Kapabilitas Kelembagaan	1,60 (C)	n/a	n/a	Belum dapat dilakukan penilaian karena termasuk IKK baru dan akan masuk dalam periode penilaian di tahun 2026
	2. Indeks Pelayanan Publik	4,52 Indeks	4,58	101,32%	Tercapai Evaluasi IPP K/L dilaksanakan Akhir Tahun oleh Kemen PAN RB
	3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik Kemenkum	3,16 Nilai	n/a	n/a	Hasil penilaian Tahun 2025 telah dilakukan oleh BSK utk periode survei Jan - Nov
	4. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	82,50 Opini	n/a	n/a	Belum dilakukan Penilaian





Meningkatnya Kinerja Perencanaan Penganggaran Satuan Kerja Kementerian Hukum	1. Indeks Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian	90,5 Nilai	98,86 Nilai	108,64%	Tercapai
	2. Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Hukum	91 Indeks	n/a	n/a	Belum dilakukan Penilaian
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	1. Persentase Rekomendasi LHE RB yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Tercapai
	2. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB	100%	100%	100%	Tercapai
Biro Sumber Daya Manusia					
Terinternalisasinya Budaya ASN BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Hukum	1. Indeks BerAKHLAK Kementerian Hukum	77,2%	91,92%	119,07%	Tercapai
	2. Indeks Merit Sistem	380	n/a	n/a	Telah dilaksanakan progress pemenuhan data dukung sesuai dengan aspek yang dibutuhkan pada aplikasi, dan progress data dukung yang telah diupload 100% dengan status Sudah diisi NB: Likudasi KASN Tahun 2024 sehingga tidak melaksanakan penilaian pada Tahun 2024





Biro Keuangan				
1. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum	WTP (opini)	WTP (opini)	100%	Tercapai
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96 Nilai	94,66	98,60%	Tidak Tercapai Masih terdapat Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi faktor pengurang Nilai sebesar
3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	Tercapai
Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama				
1. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum	100 Indeks	100 Indeks	100%	Tercapai Formula perhitungan ditentukan dan dilakukan oleh BPHN Kementerian Hukum. Kementerian Hukum (Biro Hukerma) hanya menerima hasil penilaian IRH Kementerian Hukum. Pada Periode November s.d Desember TA 2025 BPHN Tidak





Meningkatnya Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1. Nilai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	90 Nilai	95,79 Nilai	106,43%	Tercapai Penilaian Komisi Informasi Pusat Nilai 95,79 dengan Predikat Informatif
Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum	1. Indeks citra positif Kementerian Hukum	80 Indeks	99 Indeks	123,75%	Tercapai
Biro Barang Milik Negara					
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset/BMN	1. Nilai Pengelolaan Asset	3,6 Indeks	n/a	n/a	Nilai akan dikeluarkan bulan Februrari tahun 2026
	2. Indeks Tata Kelola Pengadaan	80 Indeks	99,87 Indeks	124,84%	Tercapai Nilai Mengacu pada Nilai ITKP 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama LKPP Nomor: 28006/SES/12/2025 tanggal 3 Desember 2025 hal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025





Biro Umum					
Terwujudnya Pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum	1. Nilai Tingkat Pengawasan Kearsipan	89,5 Nilai	82	91,62%	Tidak Tercapai Dikarenakan adanya perubahan Organisasi sehingga mempengaruhi pedoman kearsipan dan perubahan IKK sebagaimana tertera dalam Renstra tahun 2025 - 2029
Meningkatnya Kepuasan Layanan Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal	1. Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan	3,7	3,67	99,19%	Tidak Tercapai Dikarenakan adanya perubahan IKK sebagaimana tertera dalam Renstra tahun 2025 - 2029
Pusat Data dan Teknologi Informasi					
Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,36 Indeks	4,36 Indeks	100%	Tercapai
	Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di Superapps Kementerian Hukum	25%	27,34%	109,36%	Tercapai
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,39 Indeks	3,39 Indeks	100%	Tercapai
Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II terhadap Layanan Dukungan Manajemen	Indeks Kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,60 Indeks	3,63 Indeks	100,83%	Tercapai





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MASKUD DAN TUJUAN	10
D. ASPEK STRATEGIS	11
E. ISU STRATEGIS	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	36
B. REALISASI ANGGARAN	54
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	56
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	58
E. EFISIENSI SUMBER DAYA	64
BAB IV PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	69
LAMPIRAN	70





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Turunan Penerapan <i>Digital Governance</i>	19
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	22
Tabel 2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	22
Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal Periode Jan-Okt Tahun 2025.....	23
Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal Periode Nov-Des Tahun 2025.....	31
Tabel 3.1 Klasifikasi Capaian Kinerja.....	36
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 berdasar PK Awal.....	37
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator.....	37
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi IKP ke 1 Tahun 2025 dengan Realisasi IKP Tahun 2024.....	38
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi IKP ke 1 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	39
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi IKP ke 1 Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	39
Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKP ke 2 Tahun 2025.....	44
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKP ke 2 Tahun 2025 dengan Capaian IKP ke 2 Tahun 2024.....	45
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKP ke 2 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	45
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi IKP ke 2 Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	46
Tabel 3.11 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	48
Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi IKP Sekretariat Jenderal.....	48
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi IKP berdasar Revisi PK dengan IKP Tahun 2024.....	49
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi IKP Revisi PK Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	49
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi IKP ke 1 Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	50
Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	54
Tabel 3.17 Anggaran dan Realisasi per Jenis Kegiatan Tahun 2025.....	55
Tabel 3.18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2024–2025.....	58





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kementerian Hukum.....	3
Gambar 1.2 Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.....	4
Gambar 1.3 Struktur Pejabat Sekretariat Jenderal.....	4
Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal.....	10
Gambar 2.1 Pohon Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029.....	16
Gambar 2.2 Cascading Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Sekretariat Jenderal.....	17
Gambar 3.1 Komponen Penilaian pada Aplikasi Monev Kemenkeu.....	57
Gambar 3.2 Hasil Capaian pada Aplikasi Monev Kemenkeu.....	57
Gambar 3.3 Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025.....	58
Gambar 3.4 Capaian e-Monev Bappenas Tahun 2025.....	59
Gambar 3.5 Capaian Rencana Aksi pada Aplikasi E-Performance Tahun 2025.....	59
Gambar 3.6 Capaian Perjanjian Kinerja pada Aplikasi E-Performance Tahun 202.....	60



BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG



B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI



C. MAKSUD DAN TUJUAN



D. ASPEK STRATEGIS



E. ISU STRATEGIS



F. SISTEMATIKA PENULISAN



A. LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum selalu dalam keadaan siaga untuk menghadapi dinamika pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif, transparan dan efisien. Kepastian ketepatan dalam pelaporan anggaran dipastikan Sekretariat Jenderal harus ada dalam semua aspek penerapan, aspek – aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), inline dengan Tata Nilai Kementerian Hukum “PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan *core value* ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait pelaksanaan lebih lanjut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga penetapan Peraturan Menteri Hukum No.42 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 yang berimplikasi secara tidak langsung dalam keseluruhan dokumen perencanaan kinerja untuk seluruh Kepala Biro dan Pusat Data Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Namun di tengah dinamika perubahan Sekretariat Jenderal mampu mencapai sebagian besar target kinerja yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Sekretariat Jenderal menjadi motor penggerak terwujudnya visi dan misi Kementerian Hukum melalui penerapan manajemen internal yang terintegrasi, sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan anggaran yang akuntabel, sistem perencanaan yang SMART, manajemen kepegawaian yang profesional dan terpercaya, pembinaan hukum dan advokasi yang optimal, penyusunan bahan kebijakan yang andal dan optimal, informasi publik yang terdepan dan transparan melalui fungsi kehumasan, tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien guna kinerja Kementerian yang semakin PASTI dan Ber-AKHLAK.



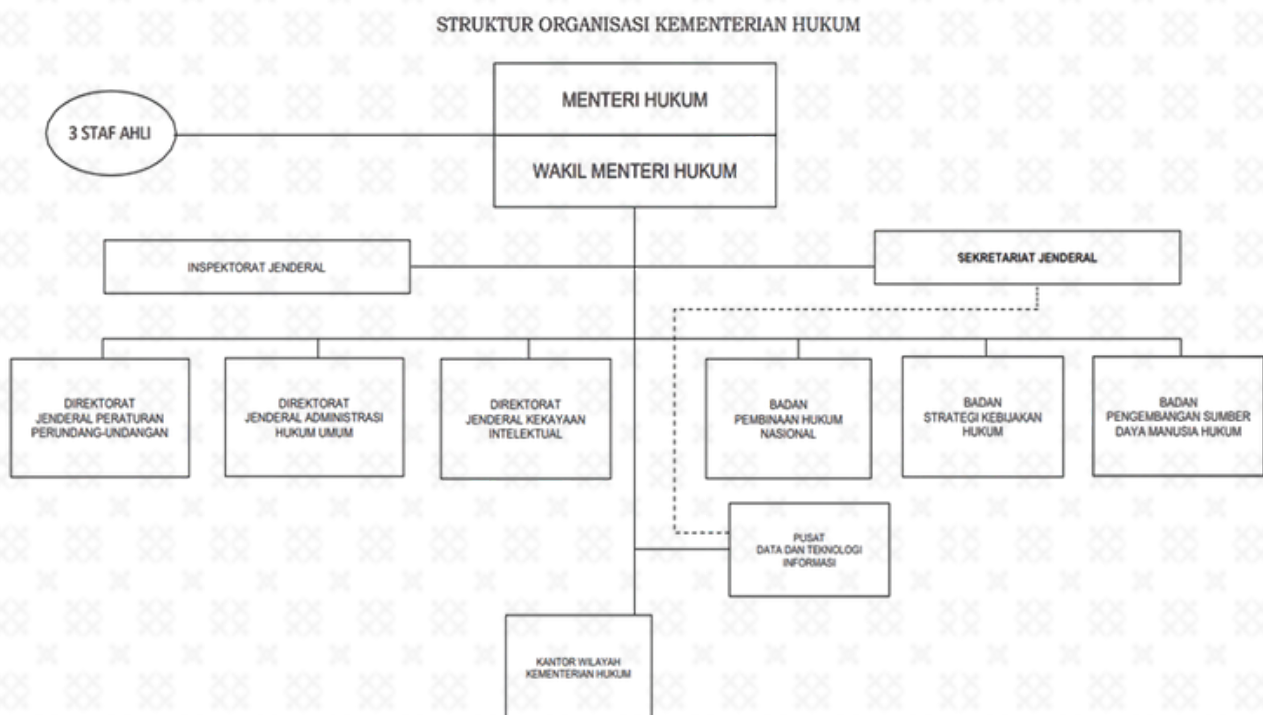
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024, Organisasi dan Tata Kerja dalam Kementerian Hukum tidak mengalami perubahan. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

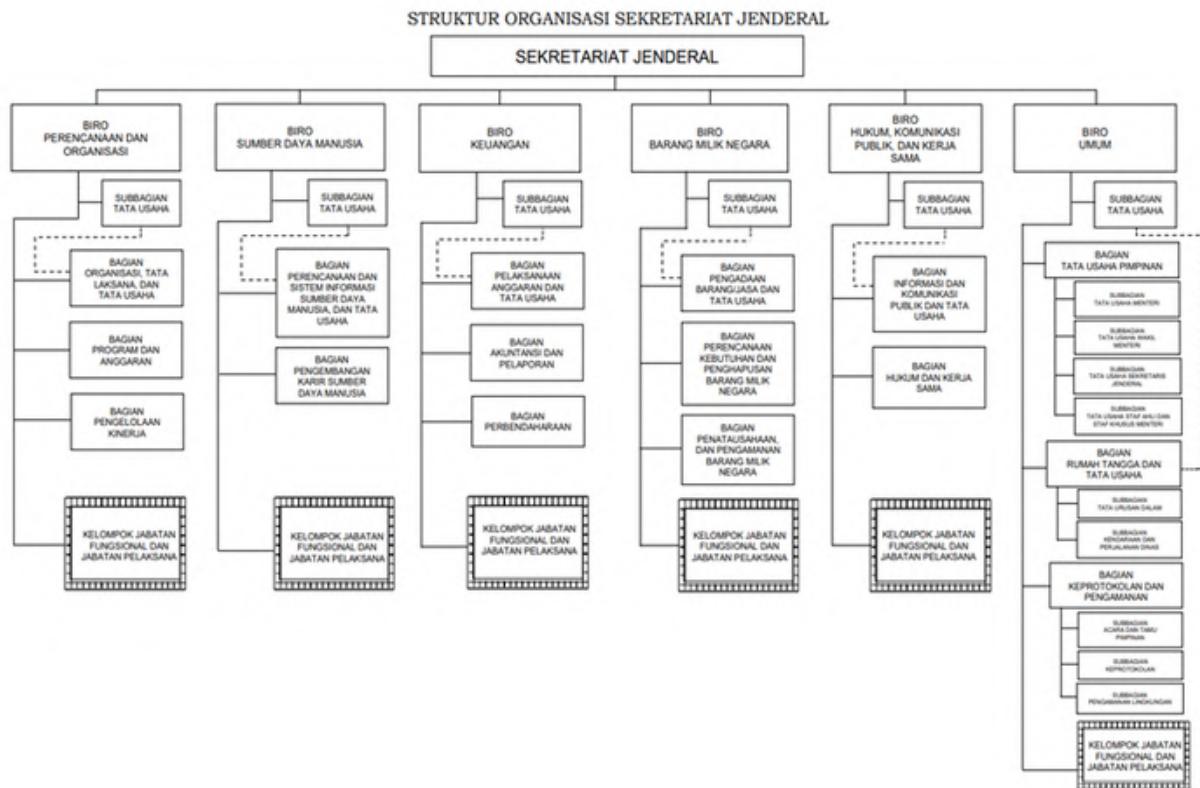
Fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Kementerian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pelayanan pengadaan barang / jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kementerian Hukum

Gambar 1.2 Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum



Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas 6 (enam) Biro dan 1 (satu) Pusat Data dan Teknologi Informasi, dengan penjelasan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Pejabat Sekretariat Jenderal



ESELON II SEKRETARIAT JENDERAL

Biro Perencanaan dan Organisasi

Tugas:

Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kinerja organisasi dan resiko, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyusunan evaluasi dan pengendali laporan Kementerian.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran Kementerian;
- c. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan;
- d. Penyusunan program dan nota keuangan/rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perubahan/revisi rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
- e. Pemberian dan koordinasi bimbingan teknis perencanaan Kementerian;
- f. Pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian;
- g. Pembinaan, penyusunan, penataan, bimbingan teknis, dan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian;
- h. Koordinasi, dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;
- i. Penyusunan dan evaluasi serta pengendali laporan Kementerian;
- j. Pemantauan, penghimpunan, penelaahan, pengevaluasian, penyiapan pengendalian dan saran tindak lanjut serta penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program dan penyusunan laporan capaian kinerja rencana kerja;
- k. Pembinaan dan penyusunan sistem manajemen kinerja organisasi di lingkungan Kementerian;
- l. Pelaksanaan penyusunan sistem pengendalian intern dan resiko di lingkungan Kementerian;
- m. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Biro Sumber Daya Manusia

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program Biro Sumber Daya Manusia;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan dan penempatan aparatur sipil negara;
- c. Koordinasi, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi aparatur sipil negara;
- d. Pengelolaan data dan arsip aparatur sipil negara Kementerian;
- e. Perumusan kebijakan di bidang manajemen aparatur sipil negara, manajemen karir, manajemen talenta dan jabatan fungsional;





- f. Penyusunan rencana dan evaluasi pengembangan kompetensi, fasilitasi peningkatan kompetensi, penentuan peserta pengembangan kompetensi, dan perencanaan penilaian kompetensi;
- g. Pembinaan, penyusunan, penataan, dan bimbingan teknis serta evaluasi analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan kelas jabatan;
- h. Penyusunan, fasilitasi, evaluasi rencana pengembangan karir, penyusunan pola karir, pelaksanaan manajemen talenta dan penugasan aparatur sipil Negara;
- i. Pembinaan, pengelolaan, penetapan kebutuhan, rencana pengembangan, dan pengadministrasian jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;
- j. Pembinaan, pengelolaan pengangkatan, mutasi, promosi, kepangkatan, demosi, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara serta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi;
- k. Pelaksanaan seleksi penyesuaian ijazah dan ujian dinas;
- l. Perencanaan dan pengelolaan gaji berkala serta biaya mutasi dan pemulangan pensiun;.
- m. Pembinaan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen kinerja aparatur sipil negara;
- n. Penyelenggaraan pengendalian dan penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian, kode etik serta kode perilaku aparatur sipil negara, penyelenggaraan pemberian penghargaan aparatur sipil negara;
- o. Pengelolaan kesejahteraan, jaminan sosial, dan perlindungan bagi aparatur sipil negara;
- p. Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan perceraian, cuti, tugas belajar dan dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara;
- q. Pelaksanaan hukuman disiplin dan pembinaan sikap mental pegawai;
- r. Penyiapan pelaksanaan budaya kerja dan citra institusi;
- s. Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia; dan
- t. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Sumber Daya Manusia.

Biro Keuangan

Tugas:

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengelolaan pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program Biro Keuangan;
- b. Penyiapan, koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian;
- c. Pengajuan, penyiapan, koordinasi, pembinaan, pengelolaan, penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian;
- d. Penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- e. Koordinasi, pembinaan, dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan pembayaran terpusat di lingkungan Kementerian;
- g. Pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pengendalian rekening negara di lingkungan Kementerian;
- h. Pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, pengelolaan, dan pengendalian penerimaan hibah di lingkungan Kementerian;





- i. Pelaksanaan dan pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar Sekretariat Jenderal;
- j. Pelaksanaan penatausahaan bendahara di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- k. Pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian;
- l. Penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja Sekretariat Jenderal dan konsolidasi laporan keuangan tingkat unit eselon I Sekretariat Jenderal dan tingkat Kementerian;
- m. Penyusunan laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat satuan kerja Sekretariat Jenderal dan konsolidasi laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit eselon I Sekretariat Jenderal dan tingkat Kementerian;
- n. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi standar akuntansi pemerintahan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan dan analisis data laporan keuangan dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
- q. Pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan di lingkungan Kementerian;
- r. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal;
- s. Pelaksanaan supervisi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian;
- t. Pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, dan pengendalian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian;
- u. Pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, dan pengendalian penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian;
- v. Pelaksanaan pembinaan, penatausahaan, dan pengendalian pejabat perbendaharaan negara di lingkungan Kementerian;
- w. Koordinasi dan pembinaan urusan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- x. Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi, monitoring, dan pelaporan di Biro Keuangan;
- y. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Keuangan; dan
- z. Penyusunan kebijakan bidang keuangan di lingkungan Kementerian.





Biro Barang Milik Negara

Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan barang milik negara dan menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program Biro Barang Milik Negara;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan rencana kebutuhan barang milik negara Kementerian;
- c. Pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan status penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara Kementerian;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Kementerian;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara kementerian;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara Kementerian; dan
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Barang Milik Negara.

Biro Hukum Komunikasi Publik dan Kerja Sama

Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kehumasan, pelayanan dan pengelolaan informasi, layanan hukum, dan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama;
- b. Pembinaan dan koordinasi kehumasan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan pelayanan perpustakaan;
- c. Pengelolaan opini publik, relasi media, produksi informasi, dan edukasi publik;
- d. Pembinaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian;
- e. Pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum dan pendapat hukum terhadap kebijakan Kementerian;
- f. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis di bidang hukum dan advokasi hukum di lingkungan Kementerian;
- g. Pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi, dan koordinasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi hubungan kelembagaan;
- i. Koordinasi, penyusunan rencana, dan fasilitasi penyusunan naskah rancangan peraturan dan keputusan di lingkungan Kementerian;
- j. Pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- k. Pelaksanaan penyusunan evaluasi, monitoring, dan pelaporan di lingkungan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama; dan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.





Biro Umum

Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan layanan ketatausahaan, kesehatan, kerumahtanggaan, prasarana fisik, keprotokolan, dan pengamanan Kementerian.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program Biro Umum;
- b. Pembinaan dan layanan ketatausahaan di lingkungan Kementerian dan tata usaha Biro Umum;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- d. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan urusan keprotokolan dan pengamanan di lingkungan Kementerian;
- f. Pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan layanan kearsipan di Lingkungan Kementerian; dan
- g. Pelaksanaan layanan kesehatan pegawai.

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Tugas:

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan manajemen, standarisasi, pengelolaan, kerja sama, monitoring dan evaluasi teknologi informasi, pengelolaan data dan aplikasi serta pengelolaan pusat data di lingkungan Kementerian Hukum.

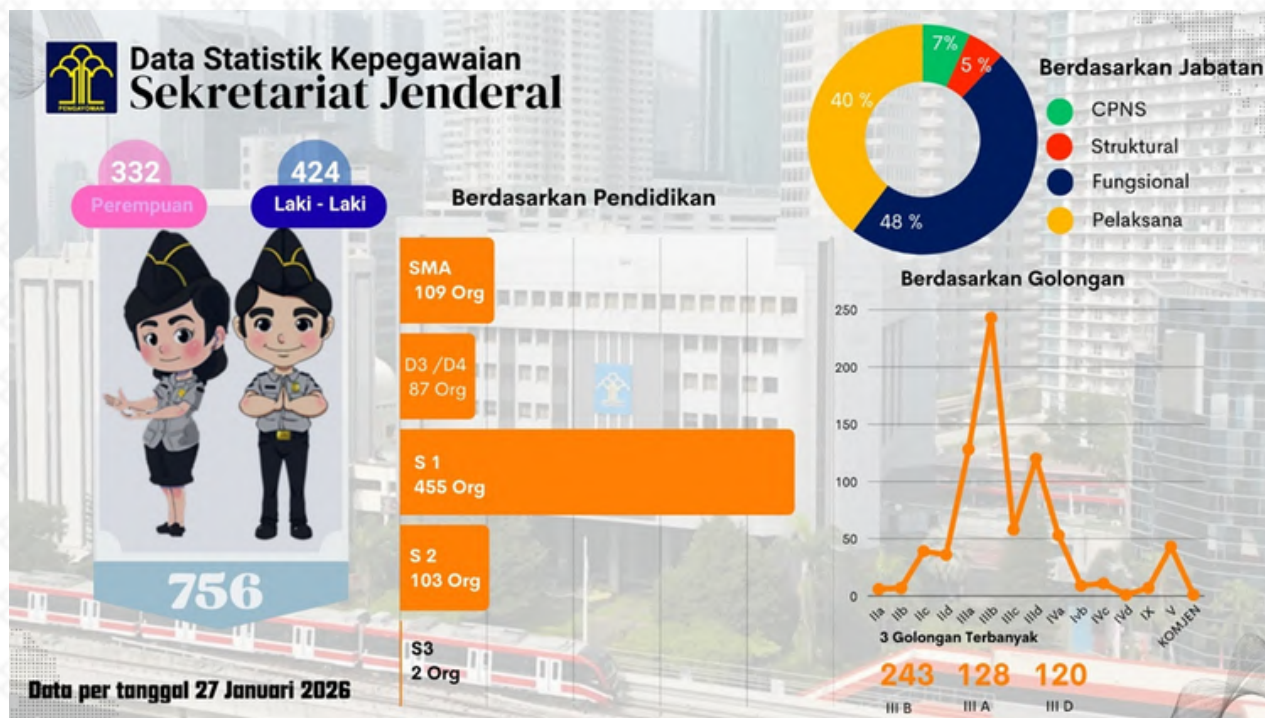
Fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusdatin;
- b. Koordinasi dan penyusunan kebijakan, perencanaan dan anggaran, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi Kementerian Hukum;
- c. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Hukum;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi Kementerian Hukum;
- e. Pelaksanaan Clearance belanja teknologi informasi;
- f. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan teknologi informasi Kementerian Hukum;
- g. Pengoordinasian pengelolaan penjaminan mutu program teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Pengoordinasian pengelolaan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi perangkat pengguna;
- i. Penyusunan standarisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi;
- j. Pengelolaan data, aplikasi dan laman Kementerian Hukum;
- k. Koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, jaringan portal dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum;
- l. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional di bidang teknologi dan sistem informasi Kementerian Hukum;
- m. Pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Hukum;



- n. Pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum;
- o. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan barang milik negara dilingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- p. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; dan
- q. Pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan kerja sama teknologi informasi Kementerian Hukum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 756 pegawai dengan rincian sebagai berikut:



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai capaian perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran penyebab keberhasilan/kegagalan atas capaian perjanjian kinerja tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum jelas, transparan, dan akuntabel;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam menyusun rencana program dan kegiatan pada periode yang akan datang.



D. ASPEK STRATEGIS

Sekretariat Jenderal merupakan salah satu Unit Eselon I dalam struktur organisasi yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian baik di Pusat maupun Daerah. Pembinaan dan koordinasi yang dilakukan Sekretariat Jenderal dengan seluruh satuan kerja dilaksanakan dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi, evaluasi dan pelaporan, barang milik negara, pengelolaan keuangan, pembinaan dan pelaksanaan hukum komunikasi publik dan kerja sama mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian, pembinaan tata persuratan dan kearsipan serta pemberian layanan pada pimpinan.

E. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Sekretariat Jenderal yaitu :

1. Masa transisi terkait transformasi kelembagaan yang berimplikasi pada keseluruhan proses perencanaan dan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, barang milik negara dan komunikasi publik serta kerjasama;
2. Belum terlaksana integrasi antara aplikasi pengukuran kinerja organisasi (E-Performance) dan aplikasi pengukuran kinerja individu (Simpeg) dikarenakan fitur E-Kinerja pada aplikasi Simpeg masih belum berfungsi;
3. Menyiapkan penyusunan rencana program pembinaan, pengelolaan dan penataan kepegawaian dalam menghadapi era 4.0;
4. Membangun budaya kerja (corporate culture) yang responsif dan terukur;
5. Fungsi kehumasan dalam memitigasi pemberitaan/isu negatif di lingkungan Kementerian Hukum yang belum optimal;
6. Proses koordinasi terkait Kerjasama dalam negeri dan juga permasalahan hukum dalam hubungan kedinasan yang terdapat di Kantor Wilayah belum ada proses inventarisasi;
7. Pemutakhiran akun penghubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum;
8. Belum selarasnya penggunaan Aplikasi Srikandi antar Kementerian/Lembaga terutama dalam pelaksanaan proses bisnis pada Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum;
9. Kepatuhan Unit Unit utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dalam penggunaan aplikasi e-Arsip guna menyukseskan program digitalisasi arsip dan pencapaian target kinerja tahun 2025;
10. Belum tersedianya payung hukum yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur pemanfaatan layanan Klinik Utama Sekretariat Jenderal;
11. Disrupsi euphoria Transformasi Digital di lingkungan Kementerian Hukum.





F. SISTEMATIKA **PENULISAN**

Penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.
IKHTISAR EKSEKUTIF	Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang penulisan laporan, gambaran umum organisasi dan sistematika penulisan.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang diambil serta mitigasi risiko terhadap pencapaian kinerja.
BAB IV	PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Tahun 2025 dan saran yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS



B. PERJANJIAN KINERJA





A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Kementerian Hukum tentunya berdampak terhadap arah strategis (strategic direction) untuk 5 (lima) tahun ke depan, termasuk dalam penetapan kinerja hingga struktur pendanaan yang dibutuhkan. Penyelarasan Visi, Misi, Program Prioritas hingga *Quick Wins* Presiden dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang menjadi acuan bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (K/L) dalam merumuskan Rencana Strategis K/L tahun 2025-2029. Pada tahapan dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan pertama, sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang untuk tetap berjalan dengan baik.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029, dipastikan inklusif dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 dikarenakan memegang Peraturan Menteri PPN Nomor 10 Tahun 2023 dan Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 sebagai panduan dan metodologi dalam menentukan strategi hingga aspek operasional Kementerian Hukum.

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Hukum. Peran strategis Kementerian Hukum dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”. Sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum, visi Sekretariat Jenderal wajib mendukung pencapaian visi Kementerian sehingga dirasa perlu untuk diselaraskan karena sesuai dengan tugas dan wewenang. Sehingga visi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum tahun 2025 - 2029 sama dengan visi Kementerian Hukum tahun 2025 - 2029, yaitu:

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”





b. Misi

Kementerian Hukum menjabarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden kedalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih.

Berdasarkan ke 2 misi Kementerian Hukum tersebut, maka misi Sekretariat Jenderal tahun 2025 - 2029 adalah :

“Melaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih”

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Kementerian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Meningkatnya Pembangunan Hukum; dan
2. Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Dengan merujuk tujuan Kementerian, maka tujuan Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 adalah:

“Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum”

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja tujuan Kementerian/Lembaga berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis Kementerian Hukum adalah sebagai berikut:

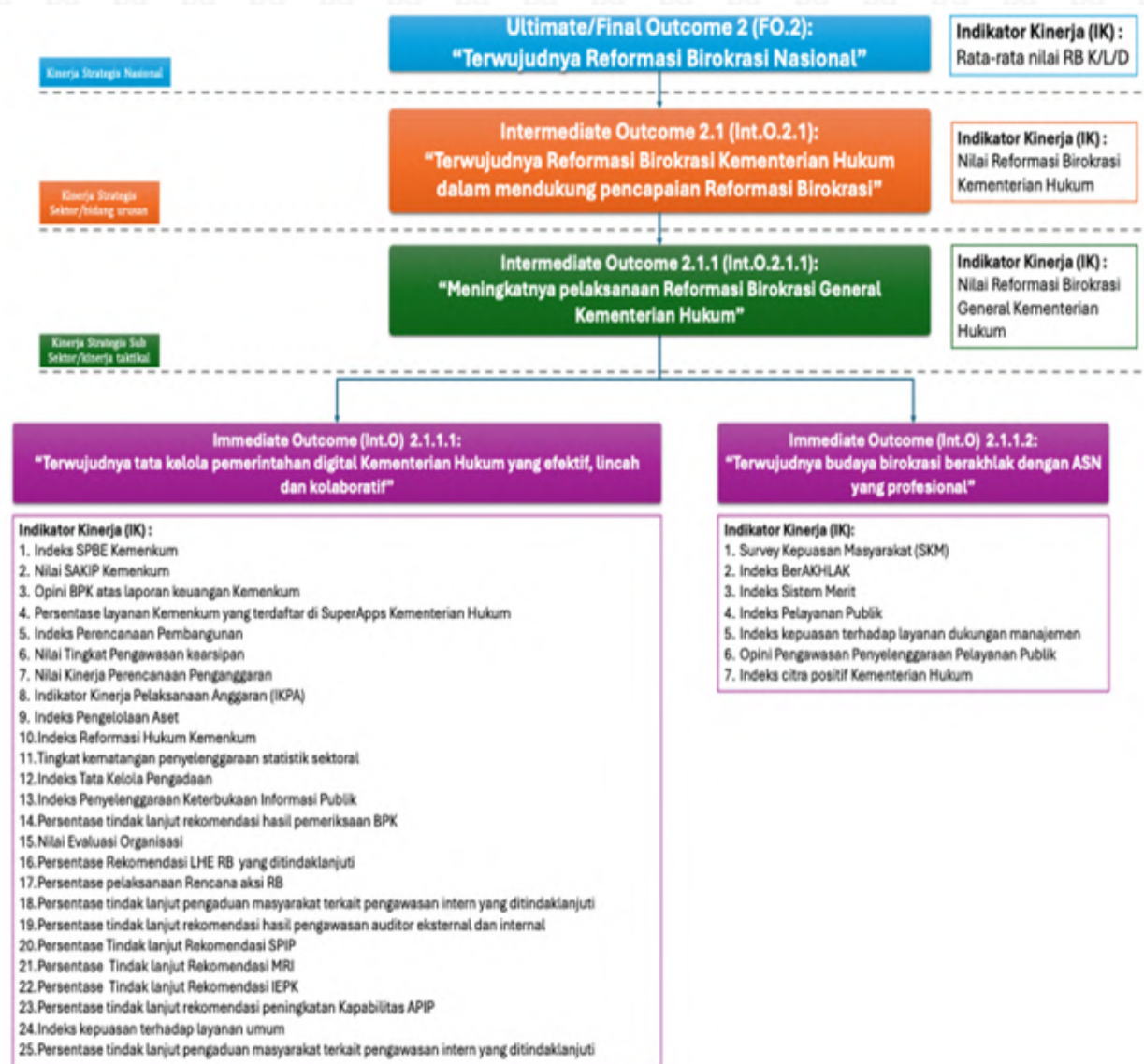
1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI; dan
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029, untuk itu perlu disusun Pohon kinerja dengan berpedoman pada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggunakan *Logic Model* dengan menguraikan kinerja menggunakan *Critical Success Factors*. Penerjemahan pohon kinerja menjadi Sasaran Program, Indikator Kinerja Program maupun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (*crosscutting*), khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional.



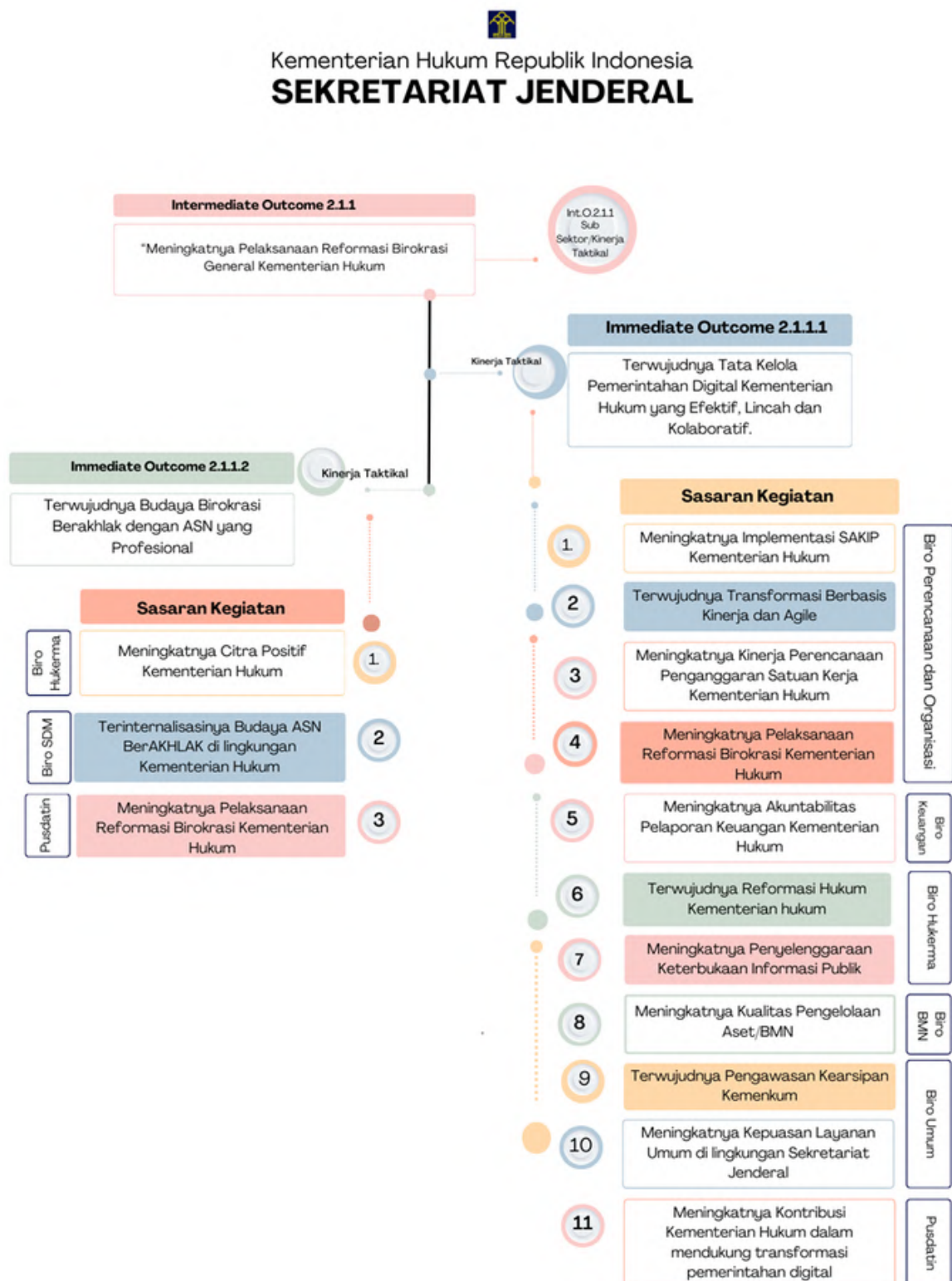
Sekretariat Jenderal mempunyai keterkaitan tugas dan kewenangan dalam sasaran ke 2 yang kemudian dipetakan kinerja lintas unit kerja untuk unit kerja turunan (cascading) dari Sekretariat Jenderal yang mana terdapat 14 (empat belas) sasaran kegiatan (SK) dan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sebagaimana tercatat dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025 – 2029 dan terpetakan dalam pohon kinerja atas rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

Sebagaimana tercatat dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025 – 2029 dan terpetakan dalam pohon kinerja atas rencana strategis Sekretariat Jenderal tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Adapun alur cascading dari sasaran strategi, sasaran program sampai dengan kegiatan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:



Gambar 2.2 Cascading Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Sekretariat Jenderal



3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan kebutuhan atas fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, peran Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dalam berbagai pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika organisasi yang semakin kompleks. Merujuk Peraturan Menteri PPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029, Sekretariat Jenderal terdorong untuk terus melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui penataan tata laksana dan kelembagaan. Penataan tata laksana dan kelembagaan akan berpengaruh terhadap penataan kepegawaian/manajemen SDM dan penataan ketatalaksanaan (manajemen) dikarenakan terkait kebijakan dan rencana yang terpadu dalam sistem birokrasi (aparatur) pemerintahan.

Arah kebijakan penataan kelembagaan Sekretariat Jenderal ditujukan untuk mendukung kebijakan strategis Kementerian Hukum yang sesuai dengan perannya sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan revitalisasi organisasi terkait pengoptimalisasian penggunaan jabatan fungsional pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian. Revitalisasi organisasi yang perlu dilakukan antara lain:

- Dibutuhkan unit kerja eselon III yang menangani penataan organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta evaluasi kelembagaan pada Biro Perencanaan dan Organisasi
- Dibutuhkan Unit ES III yang khusus menangani pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional (JF) di Biro Sumber Daya Manusia.
- Dibutuhkan unit kerja eselon III yang menangani administrasi keuangan melalui Biro Keuangan.
- Dibutuhkan unit kerja eselon III yang menangani layanan administrasi kerjasama
- Dibutuhkan unit kerja eselon III yang menangani pengelolaan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum.

Optimalisasi penggunaan jabatan fungsional dengan keahlian atau keterampilan tertentu akan terus didorong implementasinya sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta amanat Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 terkait penyederhanaan birokrasi. Baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis dengan berbagai tantangan kedepan dalam memberikan layanan yang cepat kepada stakeholders, serta untuk mewujudkan organisasi yang agile, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.



3. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada periode transisi Tahun 2025 tanggal 31 Juli 2025 sejalan dengan kondisi masa transisi Kementerian/Lembaga dari pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2010 – 2025 menuju GDRBM 2025 – 2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRBN) 2025 – 2029 dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan MenPAN-RB. Sangat penting bagi setiap instansi pemerintah untuk mengakselerasi pelaksanaan RB secara sistematis melalui integrasi kebijakan RB dalam dokumen perencanaan untuk memastikan pelaksanaan RB tidak bersifat simbolis dan parsial sehingga arah kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dapat dilakukan secara menyeluruh. Pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human-based governance* yang diturunkan dalam 5 (lima) sasaran RB dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut yaitu:

5 (Lima) Sasaran	2 (Dua) Pendekatan
1.Terwujudnya Pemerintahan Digital yang berkualitas; 2.Terciptanya Aparatur Negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan Sistem Merit; 3.Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang beretika dan inovatif; 4.Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan yang berkinerja tinggi; 5.Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.	1.Reformasi Birokrasi General; 2.Reformasi Birokrasi Tematik.

Tabel 2.1 Turunan Penerapan Digital Governance

Tahapan Reformasi Birokrasi untuk Kementerian Hukum, yaitu:

- 1.Menyusun rencana aksi (Rencana Kerja Tahunan) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Kementerian Hukum;
- 2.Monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi secara berkala (triwulan);
- 3.Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Kementerian Hukum;
- 4.Pengusulan Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 kepada KemenPAN-RB.



Arah kebijakan RB Nasional Tahun 2025 – 2045 dirumuskan dengan memperhatikan tantangan dan pembelajaran pelaksanaan RB sebelumnya, sebagai strategi RB General. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum tahun 2025 adalah:

1.Strategi 1: Mendorong Percepatan Digitalisasi Birokrasi Kementerian Hukum untuk mewujudkan birokrasi digital dalam meningkatkan layanan publik berkualitas. Strategi ini dilaksanakan melalui 14 kegiatan utama, yaitu:

- a. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan;
- b. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model modern, transparan dan adaptif bagi pegawai ASN Kementerian Hukum;
- c. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional di Kementerian Hukum;
- d. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
- f. Pembangunan Zona Integritas di setiap unit kerja;
- g. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- h. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- i. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi;
- j. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
- k. Pelaksanaan Arsip Digital;
- l. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;
- m. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- n. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2.Strategi 2: Membangun budaya kerja ASN dan meningkatkan profesionalitas ASN dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai strategi RB General. Strategi ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan utama, yaitu:

- a. Penataan dan Penertiban Jabatan Fungsional.
- b. Penguatan Manajemen Talenta ASN.
- c. Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM ASN Bidang Hukum;
- d. Rekrutmen SDM ASN Kementerian Hukum;
- e. Implementasi digitalisasi pada proses pengelolaan ASN Kementerian Hukum;
- f. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Kementerian Hukum ;
- g. Penguatan Sistem Merit;
- h. Pelaksanaan Core Values PASTI BerAKHLAK;
- i. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.





B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian. Penyusunan Renstra merupakan suatu proses yang penting dan mendasar dalam organisasi untuk memastikan ketercapaian tujuan organisasi. Renstra menjadi landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), penyusunan rencana kerja dan anggaran serta untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Strategis (Renstra) juga merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP. Anggaran untuk mewujudkan Renstra dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). Dokumen DIPA tersebut merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (Renaksi) dan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja (RKT). Pada Rencana Kerja Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2025, ditetapkan bahwa Sekretariat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen.

Program tersebut diukur dengan 1 (satu) Intermediate Outcome (Sasaran Program) dan 2 (dua) Indikator Kinerja Program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal tertanggal 07 Januari 2025, sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini:

PK Sekretaris Jenderal 7 Januari 2025 - Renstra Kemenkumham 2020 - 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi General di lingkungan Kementerian Hukum	1. Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82
	2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2025

PK Sekretaris Jenderal 23 Oktober 2025 - Renstra Kemenkum 2025 - 2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di lingkungan Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38

Tabel 2. 3 Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025

Adapun rangkuman Perjanjian Kinerja masing-masing Biro dan Pusat Data dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sebelum penetapan Rencana Strategis 2025 – 2029 untuk periode Januari – Oktober tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp. 2.998.606.225.000,-				
Pengelolaan Program, Anggaran, Tatalaksana, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Kementerian Hukum	1. Nilai SAKIP Kementerian Hukum	BB	Rp. 18.759.408.000,-
		2. Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum	80%	
	Meningkatnya Kinerja Anggaran Satuan kerja Kementerian Hukum	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Hukum	97	
		2. Rata-rata Capaian Kinerja Satuan kerja Kementerian Hukum (SMART)	95	





Pengelolaan Program, Anggaran, Tatalaksana, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Efektivitas Organisasi Kementerian Hukum	1. Indeks Pelayanan Publik	4,52	Rp. 18.759.408.000,-
		2. Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	82,50	
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum serta Layanan Internal Biro Perencanaan dan Organisasi	1. Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	80%	
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Organisasi	3,1	





Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum	1. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum	WTP	Rp. 16.299.833.000,-
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Keuangan	3,1	
		3. Indikator Kualitas Pengelolaan Anggaran	96	
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan barang/Jasa Kementerian Hukum	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan barang Milik Negara serta Pengadaan Barang dan Jasa	1. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa	3,1	Rp. 14.019.560.000,-
		2. Nilai Kualitas Pengelolaan Aset	3,30	
		3. Nilai Tata Kelola Pengadaan	Sangat Baik	
		4. Persentase Pengendalian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	95%	





Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum	Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum	1. Persentase Sentimen Positif terhadap Total Sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum	100%	Rp. 11.864.109.000,-
		2. Indeks Kepuasan UKE 1 dan Kewilayahan terhadap Layanan Administrasi Kerja Sama	3,1	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Layanan Advokasi Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Totl Permintaan	100%	
		2. Persentase Layanan Advokasi Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permintaan	100%	
		3. Persentase Putusan Perkara yang Dimenangkan	85%	
	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Menteri Hukum	4. Persentase Usulan Peraturan Menteri Hukum yang diifasilitasi	100%	





Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip	A	Rp. 1.834.871.176.000,-
	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha Protokol dan Pengamanan, serta Layanan Internal Sekretariat Jenderal	1. Persentase Layanan Tata Usaha Pimpinan yang diselesaikan	100%	
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal terhadap Layanan Rumah Tangga	3,1	
		3. Persentase Layanan Tata Usaha yang Diselesaikan	100%	
		4. Indeks Kepuasan Layanan Pengamanan Lingkup Kementerian Hukum	3,1	
		5. Persentase Layanan Protokol yang Diselesaikan	100%	
		6. Indeks Kepuasan Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal	3,1	





Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum	Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum	1. Persentase Sentimen Positif terhadap Total Sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum	100%	Rp. 11.864.109.000,-
		2. Indeks Kepuasan UKE 1 dan Kewilayahan terhadap Layanan Administrasi Kerja Sama	3,1	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Layanan Advokasi Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permintaan	100%	
		2. Persentase Layanan Advokasi Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permintaan	100%	
		3. Persentase Putusan Perkara yang Dimenangkan	85%	
	Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Menteri Hukum	4. Persentase Usulan Peraturan Menteri Hukum yang diifasilitasi	100%	





Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip	A	Rp. 1.834.871.176.000,-
	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha Protokol dan Pengamanan, serta Layanan Internal Sekretariat Jenderal	1. Persentase Layanan Tata Usaha Pimpinan yang diselesaikan	100%	
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal terhadap Layanan Rumah Tangga	3,1	
		3. Persentase Layanan Tata Usaha yang Diselesaikan	100%	
		4. Indeks Kepuasan Layanan Pengamanan Lingkup Kementerian Hukum	3,1	
		5. Persentase Layanan Protokol yang Diselesaikan	100%	
		6. Indeks Kepuasan Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal	3,1	





Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum		Nilai SPBE Kementerian Hukum	Memuaskan	Rp. 169.934.965.000,-
	Meningkatnya Implementasi SPBE di Lingkup Kementerian Hukum dan Kepuasan terhadap Layanan Pusdatin	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1	
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	100%	

Tabel 2. 4 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jendral
Periode Jan - Okt Tahun 2025



Perjanjian Kinerja masing-masing Biro dan Pusat Data dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal sesudah penetapan Rencana Strategis 2025 – 2029 untuk periode November – Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
Program Dukungan Manajemen Rp. 2.998.606.225.000,-				
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kementerian Hukum	1. Nilai SAKIP Kementerian Hukum	78,32 (BB)	Rp. 20.638.188.000,- -
	Terwujudnya Transformasi Berbasis Kinerja dan Agile	1. Nilai Indeks Kapabilitas Kelembagaan	1,60 (C)	
		2. Indeks Pelayanan Publik	4,52 Indeks	
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan publik Kemenkum	3,16 Nilai	
		4. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	82,50 Opini	



Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Penganggaran Satuan Kerja Kementerian Hukum	1. Indeks Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum	90,5 Nilai	Rp. 20.638.188.000,-
		2. Indeks Perencanaan Pembangunan Kementerian Hukum	91 Indeks	
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	1. Persentase Rekomendasi LHE RB yang Ditindaklanjuti	100%	
		2. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB	100%	
	Terinternalisasinya Budaya ASN BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Hukum	1. Indeks BerAKHLAK Kementerian Hukum	77,2% (Kategori A, Sehat)	Rp. 48.627.269.000,-
		2. Indeks Merit Sistem	380	
	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan keuangan Kementerian Hukum	1. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum	WTP (4)	Rp. 17.417.637.000,-
		2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96 Nilai	
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	





Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Terwujudnya Reformasi Hukum Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Hukum Kemenkum	100 Indeks	Rp. 12.344.109.000,-
	Meningkatnya Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	90 Nilai	
	Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum	Indeks Citra Positif Kementerian Hukum	80 Indeks	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset/BMN	1. Nilai Pengelolaan Asset	3,6 Indeks	Rp. 14.649.760.000,-
		2. Indeks Tata Kelola Pengadaan	80 Indeks	
	Terwujudnya Pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum	1. Nilai Tingkat Pengawasan Kearsipan	89,5 Nilai	Rp. 1.832.259.211.000,-
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal	1. Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Umum yang diberikan	3,7	





Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital Kementerian Hukum yang Efektif, lincah dan Kolaboratif	Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	Nilai SPBE Kementerian Hukum	4,36 Indeks	Rp. 170.593.965.000,-
		Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di <i>SuperApps</i> Kementerian Hukum	25%	
		Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,39 Indeks	
	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks Kepuasan Dukungan Manajemen	3,60 Indeks	

Tabel 2. 5 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Jenderal
Periode Nov-Des Tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



B. REALISASI ANGGARAN



C. CAPAIAN KINERJA LAINNA



D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA



E. EFISIENSI SUMBER DAYA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, pengamalan amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi sesuai target kinerja yang telah ditetapkan untuk dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak terbatas pada pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun sebelumnya oleh Sekretariat Jenderal. Dengan pagu efektif yang digunakan sebesar Rp. 1.030.964.226.000,- (data per 14 Januari 2026), dalam mendukung capaian target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja lama dan baru. Kinerja Sekretariat Jenderal merupakan kinerja kolektif dari seluruh Biro dan Pusat Data dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam memudahkan proses monitoring capaian Perjanjian Kinerja, dilakukan klasifikasi capaian berdasarkan rentang nilai. Adapun klasifikasi capaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Capaian	Warna	Keterangan
>100		Sangat Baik
85 s.d. 100		Baik
70 s.d. <85		Cukup
55 s.d. <70		Kurang
<55		Sangat Kurang

Tabel 3.1 Klasifikasi Capaian Kinerja

Secara umum Pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Tahun 2025 dapat dikategorikan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tertanggal 07 Januari 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82	n/a	n/a	Nilai Reformasi Birokrasi General masih dalam proses evaluasi oleh KemenPAN-RB sehingga capaian belum dapat dilakukan perhitungan
	2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3	n/a	n/a	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik masih dalam proses evaluasi oleh KemenPAN-RB sehingga capaian belum dapat dilakukan perhitungan

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 berdasar PK Awal

SASARAN PROGRAM 1: MENINGKATNYA PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

Indikator Kinerja Program Ke-1 : Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82	n/a	n/a	Nilai Reformasi Birokrasi General masih dalam proses evaluasi oleh KemenPAN-RB sehingga capaian belum dapat dilakukan perhitungan

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan Kementerian/Lembaga di tingkat meso.



Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum merupakan upaya yang difokuskan pada penyelesaian isu hulu atau perbaikan manajemen internal yang lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi instansi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun pelaksanaan RB General dilaksanakan melalui perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meso yakni mandat kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan Nasional, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum tahun 2025 biasanya akan dikeluarkan pada bulan februari tahun 2026. Sementara dalam mendukung capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum tahun 2025 telah dilakukan langkah/kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (General dan Tematik) Kementerian Hukum tahun 2025;
2. Internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada satuan kerja;
3. Pemenuhan data dukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) oleh satuan kerja melalui aplikasi E-RB setiap triwulan;
4. Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK secara mandiri di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2025;
5. Monitoring dan Evaluasi RKT RB Kementerian Hukum setiap triwulan;
6. Penyampaian capaian hasil monitoring dan evaluasi RKT RB melalui Portal RB Nasional milik KemenPAN-RB setiap triwulan;

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2025 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Indikator	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan
Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	86,33	n/a	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum tahun 2025 akan dikeluarkan bulan Februari pada tahun 2026

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi IKP ke 1 Tahun 2025 dengan Realisasi IKP Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029 yang bertransformasi menjadi 3 (tiga) bidang fungsi Kementerian tersendiri dan 1 (satu) koordinator bidang, maka realisasi Nilai Reformasi Birokrasi General yang diperoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat digunakan menjadi baseline dalam penetapan target kinerja Kementerian Hukum.



c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029, salah satu yang menjadi kebijakan pokok adalah mendorong percepatan penajaman Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 tahun 2025 dengan target Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/ Indikator	Target Renstra	Target	Realisasi
		2025	
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum			
Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38	82	n/a

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi IKP ke 1 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dikarenakan masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN RB dan hasilnya akan disampaikan pada bulan Februari tahun 2026.

d. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2025 dengan standar nasional pencapaian nilai hasil evaluasi Reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Indikator	Realisasi		Standar Nasional RB K/L Tahun 2024
	2024	2025	
Nilai Reformasi Birokrasi General	86,33	n/a	82,98

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi IKP ke 1 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Namun berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, bahwa pada tahun 2024 kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.



Dan berdasarkan Nilai RB Tahun 2024 sebesar 90,38, Kementerian Hukum telah berhasil mencapai rata-rata standar nasional. (Sumber:<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dua-dekade-menuju-indonesia-emas-gdrbn-2025-2045-fokus-pada-transformasi-digital-pemerintah-hingga-peningkatan-kompetensi-aparatur>).

e. Analisis atas Kendala dan Solusi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2025

1) Kendala

Dalam pencapaian indikator nilai Reformasi Birokrasi General, masih terdapat kendala sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Mitigasi Risiko terhadap indikator ke 1 “Belum tersedianya anggaran yang optimal dalam Pelaksanaan RB Meso, sehingga penanggung jawab terkendala dalam menjalankan rencana aksi RB meso yang telah disusun dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan meso sehingga berdampak terhadap upaya peningkatan nilai RB General”. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meso Kementerian Hukum pada tahun 2025 merupakan dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

2) Solusi

Penambahan anggaran yang tepat bagi pelaksanaan RB meso menjadi salah satu solusi yang efektif dalam upaya mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Selain itu penanggung jawab RB meso diharapkan agar tetap konsisten dan berkomitmen dalam upaya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Lakukan mitigasi atas pemberitaan/isu negatif terkait Kementerian Hukum;
- b. Lakukan publikasi positif atas capaian kinerja Kementerian Hukum;
- c. Lakukan berbagai terobosan kreatif melalui inovasi untuk memudahkan pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;
- d. Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SPAK-Survei Persepsi Anti Korupsi dan SPKP-Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) melalui aplikasi 3AS pada periode waktu yang telah ditentukan secara terencana, terprogram, dan terlaksana secara berkelanjutan, dengan jumlah perhitungan responden sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie;
- e. Lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana aksi RB Meso secara berkala setiap triwulan.





f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program/Kegiatan yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam menunjang keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program ke 1 ini adalah dengan melakukan program/kegiatan sebagai berikut:

- a) Menindaklanjuti temuan BPK ;
- b) Menindaklanjuti AoI terkait PM SPIP Terintegasi di lingkungan Kementerian Hukum;
- c) Menindaklanjuti Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terkait penilaian SAKIP di tahun sebelumnya; dan
- d) Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) berdasarkan rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi (LHE RB) Kementerian Hukum Tahun 2024. RATL tersebut dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Kementerian Hukum Tahun 2025. Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum telah melaksanakan RATL pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2025, dan telah dilakukan monev internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaannya.

g. Analisis atas manajemen risiko dan tindakan pengendalian

- 1) Rekomendasi dari Kementerian PAN RB terkait Evaluasi SAKIP tahun 2024 yang belum sepenuhnya selesai dilaksanakan, telah dilakukan penetapan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dan Pemantauan evaluasi berkelanjutan atas rencana aksi atas perjanjian kinerja tersebut;
- 2) Tidak tercapainya Target Kinerja di level Menteri, Eselon I dan Eselon II pada akhir periode Renstra dan Renja, telah dilakukan pengukuran kinerja setiap bulan dan juga monitoring evaluasi terkait pengukuran kinerja melalui aplikasi e Performance per semester;
- 3) Hasil Sosialisasi Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang belum dipahami secara maksimal sehingga dalam proses implementasinya terkendala, dengan tindakan pengendalian penggunaan berbagai saluran komunikasi dalam membuat panduan pelayanan publik secara digital untuk dapat memaksimalkan pengimplementasian aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh seluruh satker;
- 4) Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dimitigasi dengan cara melakukan pendampingan melalui berbagai saluran komunikasi untuk satuan kerja yang mengalami kesulitan;

Terkait Indikator Kinerja Program ke 1 adapun risiko yang berpotensi terjadi telah diidentifikasi sebanyak 3 kategori risiko, yaitu Risiko terkait Kebijakan Standar Kinerja dan Operasional sebanyak 27 potensi risiko, Risiko terkait Fraud sebanyak 4 potensi risiko dan Risiko terkait Keuangan sebanyak 5 potensi risiko dengan tindakan pengendalian sebagai berikut:

- **27 (dua puluh tujuh) Potensi Risiko Terkait Kebijakan Standar Kinerja dan Operasional, seperti:**



- 
- 
- 5) Rekomendasi Kemen PAN RB terkait Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), baik terkait Rencana Tindak Lanjut (RTL) ataupun terkait pelaksanaan unit penanggung jawab RB Meso, tahun 2024 yang belum sepenuhnya selesai dilaksanakan hingga akhir tahun 2025 dilakukan mitigasi risiko dengan melakukan pemantauan atas hasil validasi implementasi rencana aksi RB;
 - 6) Peningkatan kualitas implementasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) RB yang belum maksimal dilakukan dengan melaksanakan pemantauan atas RKT secara berkala untuk semua unit satuan kerja;
 - 7) Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kementerian Hukum yang belum maksimal dilakukan internalisasi urgensi pemenuhan data dukung LKE ZI, penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman dan KPK dapat terpenuhi demi menyukkseskan pembangunan ZI;
 - 8) Redistribusi jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Hukum yang minim agar sesuai kebutuhan dan prioritas;
 - 9) Penerapan Manajemen Talenta dilakukan dengan mulai melakukan pemetaan untuk semua jenjang jabatan;
 - 10) Tidak updatenya data kepegawaian dimitigasi dengan melakukan pendataan pegawai yang belum melakukan update data pribadi pada SIASN;
 - 11) Ketidaktepatan serta kesalahan penggunaan pembebanan akun dalam Laporan Keuangan mengakibatkan adanya temuan pemeriksaan yang harus dilakukan evaluasi terkait ketidaktepatan serta kesalahan yang terjadi;
 - 12) Ketelatan penyusunan Laporan Keuangan (LK) likuidasi satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2025 mengakibatkan perlu dilakukannya asistensi dalam penyusunan LK likuidasi satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM;
 - 13) Ketidaksesuaian Realisasi Rencana Pencairan Dana (RDP) pada satuan kerja memerlukan pendampingan dalam penyusunan RDP dan evaluasi berkala dalam melakukan perbaikan peningkatan realisasi satuan kerja;
 - 14) Kehilangan data informasi arsip pada unit utama, kantor wilayah dan UPT sebagai bukti pertanggungjawaban diminimalisir dengan melakukan monev kearsipan dengan pelatihan pengelolaan arsip dinamis bagi satuan kerja;
 - 15) Pengaturan Kebijakan Internal terkait rangkaian proses pengelolaan data dilakukan dengan menyusun standar meta data dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data;
 - 16) Menyusun SOP penggunaan SPL IPPD Komdigi sebagai media penghubung layanan
 - 17) Penolakan Komdigi, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB terkait permohonan belanja TIK SOP pelaksanaan clearance harus dipatuhi;
 - 18) Pedoman manajemen aset TIK dan daftar aset yang belum dibuat dengan melaksanakan SOP pendaftaran aset TIK;
 - 19) Kendala dalam pembaharuan framework aplikasi dalam proses pengembangan sehingga dirasakan perlu untuk menyusun standarisasi framework aplikasi terbaru;



- 20) Dalam rangka meminimalisir risiko kebocoran data pribadi diperlukan adanya kebijakan tersendiri dalam Kementerian Hukum terkait pengamanan data;
- 21) Risiko adanya sentimen negatif yang berdampak terhadap citra Kementerian Hukum dimitigasi dengan melakukan media monitoring secara berkala melalui penyampaian informasi pada kanal media resmi Kementerian, serta pendekatan kegiatan kehumasan bersama media;
- 22) Ketidaktepatan satuan kerja terutama satker wilayah atas Pedoman Manajemen Kehumasan diminimalisir dengan melakukan pembaharuan pedoman agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan
- 23) Ketidaktepatan antara RKBMN dengan Realisasi dimitigasi dengan melakukan penertiban dokumen kepemilikan BMN sesuai ketentuan PUU yang berlaku;
- 24) Ada BMN yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan ditindaklanjuti dengan menertibkan dokumen kepemilikan BMN sesuai ketentuan PUU yang berlaku;
- 25) Ketidaktepatan pencatatan pada aplikasi SAKTI dilakukan tindakan pengendalian melalui kegiatan koreksi akun pada aplikasi SAKTI;
- 26) BMN rusak berat tidak dapat ditindaklanjuti dimitigasi dengan segera melakukan kegiatan percepatan penghapusan BMN yang berada dalam kondisi rusak berat;
- 27) Persetujuan pemindahtanganan dan penghapusan yang tidak ditindaklanjuti mitigasi atas risiko ini adalah dengan menertibkan surat perpanjangan persetujuan penjualan/perubahan nilai limit persetujuan dan melakukan penerbitan SK penghapusan sesegera mungkin.

• **4 (empat) Potensi Risiko Terkait Fraud seperti:**

- 1) Pemberian nilai evaluasi RKT/ZI tidak obyektif dapat dihindari dengan melakukan silang penilaian antar wilayah;
- 2) Benturan kepentingan berupa gratifikasi pada jabatan pengelola kepegawaian dalam melaksanakan penilaian penetapan angka kredit dilakukan dengan membuat tim penanganan Benturan dengan perencanaan kegiatan sosialisasi terkait penanganan benturan kepentingan;
- 3) Temuan pemeriksaan BPK terkait pertanggung jawaban belanja tidak sesuai ketentuan mitigasi atas potensi risiko ini dilakukan dengan melakukan evaluasi atas penilaian Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 4) Terjadi benturan kepentingan dalam pengelolaan rumah negara Gunung Sindur dimitigasi dengan melakukan penertiban atas penghuni yang tidak ada surat izin penghunian.

• **5 (lima) Potensi Risiko Terkait Keuangan seperti:**

- 1) Pelaksanaan penyelesaian kasus TP/GR yang belum optimal dapat dimitigasi dengan melakukan kegiatan pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 2) Penagihan PNBP Rumah Negara tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan belum adanya penertiban terhadap *illegal resident* di Rumah Negara dengan penyusunan Peraturan Menteri Hukum tentang P3DN;



- 3) Pemanfaatan lahan BMN milik Sekretariat Jenderal dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diatasi dengan pemantauan dan pengamanan terhadap aset yang dimiliki secara berkala;
- 4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai ketentuan diatasi dengan monitoring terhadap pelaksanaan barang/jasa;
- 5) Pelaksanaan Pengadaan Produk Impor yang tidak sesuai ketentuan diatasi dengan monitoring terhadap penggunaan produk impor yang tidak sesuai.

Indikator Kinerja Program Ke-2 : Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3	n/a	n/a	Hasil evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum tahun 2025 akan dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2026

Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi IKP ke 2 Tahun 2025

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Reformasi Birokrasi Tematik adalah Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada penyelesaian isu hilir atau percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Adapun tema RB Tematik tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Mendorong Hilirisasi;
4. Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan;
5. Mendukung Ketahanan Pangan Nasional;
6. Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

Hasil evaluasi penilaian Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum tahun 2025 akan dikeluarkan pada tahun 2026.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-1 Tahun 2025 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	4,05	n/a	Hasil evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum tahun 2025 belum terbit dari Kementerian PANRB

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian IKP ke 2 Tahun 2025 dengan Capaian IKP ke 2 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029 yang bertransformasi menjadi 3 (tiga) bidang fungsi Kementerian tersendiri dan 1 (satu) koordinator bidang, maka realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tematik yang diperoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat digunakan menjadi baseline dalam penetapan target kinerja Kementerian Hukum.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025 - 2029, salah satu yang menjadi kebijakan pokok adalah mendorong percepatan penajaman reformasi birokrasi tematik Kementerian Hukum. Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2 tahun 2025 dengan target Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/ Indikator	Target	Realisasi
	2025	
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum		
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3	n/a

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian IKP ke 2 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029 karena hasil evaluasi penilaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum tahun 2025 akan dikeluarkan pada bulan Februari Tahun 2026 oleh Kementerian PAN RB. Sementara dalam penetapan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 tahun 2025 tentang Rencana Strategis tahun 2025 - 2029, Indikator Kinerja Program Ke-2 ini tidak menjadi indikator kinerja program dari Sekretariat Jenderal.

b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2025 dengan standar nasional pencapaian nilai hasil evaluasi Reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Indikator	Realisasi		Standar Nasional RB K/L Tahun 2024
	2024	2025	
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	4,05	n/a	82,98

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi IKP ke 2 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Namun berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, bahwa pada tahun 2024 kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya. Dan berdasarkan Nilai RB Tahun 2024 sebesar 90,38, Kementerian Hukum telah berhasil mencapai rata-rata standar nasional. (Sumber:<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dua-dekade-menuju-indonesia-emas-gdrbn-2025-2045-fokus-pada-transformasi-digital-pemerintah-hingga-peningkatan-kompetensi-aparatur>).

e. Analisis atas penyebab Kendala dan Solusi Indikator Kinerja Program Ke-2 Tahun 2025

1) Kendala

- Masih terdapat beberapa produk dalam negeri yang belum memenuhi kriteria dan kualifikasi untuk masuk dalam buku biru pengadaan barang dan jasa;
- Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Legitimasi dan Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki;
- Masih banyak masyarakat yang belum memiliki usaha secara resmi dan tercatat;
- Berdasarkan Mitigasi Risiko terhadap indikator ke 2 “Belum tersedianya anggaran yang optimal dalam Pelaksanaan RB Tematik, sehingga penanggung jawab terkendala dalam menjalankan rencana aksi RB Tematik yang telah disusun dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan sehingga berdampak terhadap upaya peningkatan nilai RB Tematik yang menjadi salah satu faktor penambah untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum”. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Kementerian Hukum pada tahun 2025 merupakan dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.



2) Solusi

- a. Mensosialisasikan pentingnya legitimasi Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat luas;
- b. Menggerakkan sosialisasi layanan administrasi hukum umum yang dimiliki Kementerian Hukum;
- c. Lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana aksi RB Tematik secara berkala setiap triwulan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program/Kegiatan yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam menunjang keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke 2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum tahun 2025 telah dilakukan langkah/kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan penyusun Peraturan Menteri Hukum terkait P3DN;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum tahun 2025;
3. Pemenuhan data dukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan oleh satuan kerja pada aplikasi E-RB setiap triwulan;
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum setiap triwulan;
5. Penyampaian capaian hasil monitoring dan evaluasi RKT RB Tematik melalui Portal RB Nasional KemenPAN-RB setiap triwulan.

g. Analisis atas manajemen risiko dan tindakan pengendalian

Terkait Indikator Kinerja Kegiatan ke 2 ini, risiko yang berpotensi terjadi telah diidentifikasi sebanyak 1 kategori risiko terkait kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) Potensi Risiko Terkait Standar Kinerja
Penggunaan produk impor lebih dari 5% anggaran Pengadaan Barang/jasa Kementerian Hukum dimitigasi dengan melakukan penyusunan Peraturan Menteri Hukum tentang P3DN dengan dilanjutkan kegiatan internalisasi ataupun sosialisasi terkait satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
- 2 (dua) Potensi Risiko Terkait Keuangan
 - a. Terkait pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai ketentuan, pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan Barang/Jasa mampu meminimalisir potensi keterjadiaan risiko tersebut;
 - b. Begitupun dengan pelaksanaan pengadaan produk impor yang tidak sesuai ketentuan diminimalisir melalui kegiatan monitoring atas penggunaan produk impor yang tidak sesuai.

Penetapan Rencana Strategis Kementerian tahun 2025 - 2029 yang diikuti dengan perubahan Rencana Strategis untuk seluruh unit eselon I berdampak pada Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Tahun 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 tertanggal 23 Oktober 2025 pada tabel berikut:



Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38	n/a	n/a	Hasil evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum tahun 2025 belum terbit dari Kementerian PANRB

Tabel 3.11 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL KEMENTERIAN HUKUM

Indikator Kinerja Program : Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38	n/a	n/a	Hasil evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum tahun 2025 belum terbit dari Kementerian PANRB

Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi IKP Sekretariat Jenderal

Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga. Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum merupakan Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada penyelesaian isu hulu atau perbaikan manajemen internal instansi pemerintah. Adapun pelaksanaan RB General dilaksanakan melalui perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meso yakni mandat kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan Nasional, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

Nilai Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum tahun 2025 akan dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2026. Indikator Kinerja Program ini merupakan terusan dari Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal sebelumnya, sehingga capaian dan realisasinya mengacu pada bahasan Indikator Kinerja Program sebelumnya dengan penambahan +5,38 target capaian kinerja sedari 82 menjadi 87,38.



b. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025 dengan Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	86,33	n/a	Hasil evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum tahun 2025 belum terbit dari Kementerian PANRB

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi IKP berdasar Revisi PK dengan IKP Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 - 2029 yang bertransformasi menjadi 3 (tiga) bidang fungsi Kementerian tersendiri dan 1 (satu) koordinator bidang, maka realisasi Nilai Reformasi Birokrasi General yang diperoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat digunakan menjadi baseline dalam penetapan target kinerja Kementerian Hukum.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029 tertanggal 10 Oktober 2025 , salah satu yang menjadi kebijakan pokok adalah mendorong percepatan penajaman Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 tahun 2025 dengan target Jangka Menengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Program/Indikator	Target	Realisasi
	2025	
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General		
Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38	n/a

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi IKP Revisi PK Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 setelah penetapan Rencana Strategis tahun 2025 - 2029, belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dikarenakan masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN RB dan hasilnya akan dapat diketahui pada bulan Februari tahun 2026.

d. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Program Tahun 2025 dengan standar nasional pencapaian nilai hasil evaluasi Reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Indikator	Realisasi		Standar Nasional RB K/L Tahun 2024
	2024	2025	
Nilai Reformasi Birokrasi General	86,33	n/a	82,98

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi IKP ke 1 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Namun berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, bahwa pada tahun 2024 kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya. Dan berdasarkan Nilai RB Tahun 2024 sebesar 90,38, Kementerian Hukum telah berhasil mencapai rata-rata standar nasional.

(Sumber: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dua-dekade-menuju-indonesia-emas-gdrbn-2025-2045-fokus-pada-transformasi-digital-pemerintah-hingga-peningkatan-kompetensi-aparatur>).

e. Analisis atas Kendala dan Solusi Indikator Kinerja Program Tahun 2025

1) Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi General, masih terdapat kendala sebagai berikut:

- Berdasarkan Mitigasi Risiko terhadap indikator ke 1 “Belum tersedianya anggaran yang optimal dalam Pelaksanaan RB Meso, sehingga penanggung jawab terkendala dalam menjalankan rencana aksi RB meso yang telah disusun dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan meso sehingga berdampak terhadap upaya peningkatan nilai RB General”. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi meso Kementerian Hukum pada tahun 2025 merupakan dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

2) Solusi

Penambahan anggaran yang tepat bagi pelaksanaan RB meso menjadi salah satu solusi yang efektif dalam upaya mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum. Selain itu penanggung jawab RB meso diharapkan agar tetap konsisten dan berkomitmen dalam upaya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum, melalui langkah-langkah sebagai berikut:



- a. Lakukan mitigasi atas pemberitaan/isu negatif terkait Kementerian Hukum;
- b. Lakukan publikasi positif atas capaian kinerja Kementerian Hukum;
- c. Lakukan berbagai terobosan kreatif melalui inovasi untuk memudahkan pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;
- d. Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SPAK-Survei Persepsi Anti Korupsi dan SPKP-Survei Persepsi Kualitas Pelayanan) melalui aplikasi 3AS pada periode waktu yang telah ditentukan secara terencana, terprogram, dan terlaksana secara berkelanjutan, dengan jumlah perhitungan responden sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie;
- e. Lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana aksi RB Meso secara berkala setiap triwulan.
- f. Berdasarkan Mitigasi Risiko terhadap indikator ke 1 di atas “Belum Optimalnya Pengendalian Pelaksanaan RB Meso dari masing masing penanggung jawabnya”. Pada risiko tersebut penanggung jawab masih belum maksimal dalam penerapannya.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Program ini belum dapat dilakukan dikarenakan masih belum adanya hasil penilaian Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dari Kementerian PAN dan RB.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program/Kegiatan yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam menunjang keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program ini adalah dengan melakukan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti temuan BPK ;
2. Menindaklanjuti Aol terkait PM SPIP Terintegasi di lingkungan Kementerian Hukum.

h. Analisis atas manajemen risiko dan tindakan pengendalian

Terkait Indikator Kinerja Program adapun risiko yang berpotensi terjadi telah diidentifikasi sebanyak 21 potensi risiko, sebagai berikut:

- 1) Potensi risiko tidak tercapainya Nilai Indeks Pelayanan Publik telah dilakukan pengendalian melalui sosialisasi aspek penyelenggaraan pelayanan publik serta pelatihan budaya pelayanan prima kepada seluruh satuan kerja. Selain itu, mitigasi risiko dilakukan melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP), disertai dengan monitoring dan evaluasi yang hasilnya segera ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja;
- 2) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Kementerian Hukum telah diatasi melalui sosialisasi dan penguatan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat kepada seluruh satuan kerja. Selain itu, dilakukan mitigasi risiko berupa pendampingan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP), yang disertai dengan monitoring evaluasi serta tindak lanjut atas hasil monev penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing - masing satuan kerja;





- 3) Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang belum optimal dilakukan kegiatan pengendalian risiko melalui sosialisasi dan penguatan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat kepada seluruh satuan kerja. Selain itu, mitigasi risiko dilaksanakan melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP), serta pelaksanaan monitoring evaluasi yang disertai dengan tindak lanjut atas hasil monev penyelenggaraan pelayanan publik oleh setiap satuan kerja;
- 4) Adanya sentimen negatif terhadap Kementerian Hukum yang berpotensi berdampak pada menurunnya publikasi positif dan daya tarik informasi layanan/kinerja kepada masyarakat telah dilakukan pengendalian melalui klarifikasi oleh Pimpinan pada berbagai media, baik melalui penyelenggaraan event atau acara tertentu serta pelaksanaan kegiatan kehumasan bersama media;
- 5) Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data yang belum sepenuhnya sesuai standar telah dilakukan pengendalian melalui penyusunan Pedoman Pengelolaan Satu Data yang mencakup seluruh aspek tersebut. Selain itu, mitigasi risiko dilaksanakan melalui penyusunan Standar Metadata serta dukungan publikasi positif dan menarik kepada masyarakat terkait layanan dan kinerja Kementerian Hukum.;
- 6) Kendala dalam proses pengembangan aplikasi telah dilakukan pengendalian melalui pembaruan standardisasi framework aplikasi. Selanjutnya, mitigasi risiko dilaksanakan melalui proses upgrade framework aplikasi ke versi terbaru serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan framework aplikasi;
- 7) Terkait adanya potensi kebocoran data, telah dilakukan kegiatan pengendalian melalui pelaksanaan sosialisasi Manajemen Keamanan Informasi. Selanjutnya, mitigasi risiko dilaksanakan melalui identifikasi awal terhadap potensi serangan siber yang disertai dengan proses monitoring dan evaluasi Manajemen Keamanan Informasi;
- 8) Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum yang telah dilakukan pengendalian melalui pembaruan SOP Tata Kelola Pusat Data. Selanjutnya, mitigasi risiko dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan dan peremajaan infrastruktur Pusat Data sesuai kondisi terkini, pembaruan lisensi perangkat lunak, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tata Kelola Pusat Data;
- 9) Indeks Budaya Kerja yang masih rendah telah dilakukan pengendalian melalui pembinaan dan pemetaan pegawai untuk meningkatkan pemahaman terkait indeks budaya kerja. Mitigasi risiko selanjutnya dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi atas indeks budaya kerja, serta tindak lanjut hasil monev yang diterapkan pada masing-masing satuan kerja;
- 10) Tidak tersedianya data kearsipan sebagai bukti telah dilakukan pengendalian melalui pembinaan dan pelatihan terkait tata kelola arsip dinamis di lingkungan Kementerian. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan penerbitan surat edaran untuk pemaksimalan dan pembentukan ruangan arsip pada setiap unit kerja, serta melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kearsipan;





- 11) Realisasi belanja modal yang tidak sesuai RKBMN telah dilakukan pengendalian melalui kerja sama dengan Biro Perencanaan untuk melaksanakan kegiatan supervisi belanja modal di lingkungan Kanwil dan UPT, guna meminimalisir ketidaksesuaian antara RKBMN dan RKA-KL. Mitigasi risiko selanjutnya dilaksanakan dengan melibatkan perencana anggaran, pengguna barang, serta SDM pengelola BMN dalam proses, serta melalui penerbitan clearance/tanggapan terkait penyelarasan RKA-K/L dengan RKBMN dan pengajuan revisi RKBMN oleh satuan kerja pada tahun anggaran berjalan;
- 12) Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN telah dilakukan pengendalian dengan memastikan status tanah dalam kondisi clean and clear serta telah memiliki dokumen kepemilikan sebelum permohonan perolehan tanah baru. Mitigasi risiko selanjutnya dilaksanakan melalui program pensertifikatan KPKNL dari Kementerian Keuangan serta pemutakhiran data BMN pada Master Aset SIMAN;
- 13) Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI telah dilakukan pengendalian melalui pembinaan dan pendampingan secara berkala terkait pencatatan akun. Mitigasi risiko dilaksanakan melalui kegiatan koreksi akun pada aplikasi SAKTI serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev);
- 14) BMN rusak berat yang tidak dapat ditindaklanjuti melalui penghapusan atau penjualan telah dilakukan pengendalian dengan identifikasi dan pemetaan BMN rusak berat, serta pembinaan penghapusan BMN pada satuan kerja berdasarkan hasil identifikasi tersebut. Mitigasi risiko dilaksanakan melalui percepatan penghapusan BMN dalam kondisi rusak berat, disertai kegiatan monitoring dan evaluasi atas BMN tersebut;
- 15) Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang tidak menindaklanjuti persetujuan BMN rusak berat hingga terbitnya keputusan penghapusan sesuai jangka waktu yang ditentukan telah dilakukan pengendalian melalui kegiatan pembinaan dan pemutakhiran data tindak lanjut persetujuan penjualan BMN rusak berat. Mitigasi risiko dilaksanakan melalui penerbitan surat perpanjangan persetujuan penjualan atau perubahan nilai limit persetujuan, percepatan penerbitan keputusan penghapusan BMN rusak berat, serta monitoring dan evaluasi pemutakhiran data tindak lanjut persetujuan penjualan dan keputusan penghapusan BMN;
- 16) Potensi risiko terkait pola manajemen karir yang belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum saat ini telah dikendalikan melalui penyelarasan regulasi karir dengan kondisi terkini. Mitigasi risiko dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pengembangan karier, pola karier, dan manajemen talenta pegawai, serta identifikasi ketidaksesuaian dan tindak lanjut permasalahan terkait lingkup pengembangan karier, pola karier, dan manajemen talenta pegawai di lingkungan Kementerian Hukum;



- 17) Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran telah dikendalikan melalui pendampingan penyusunan postur anggaran Kementerian Hukum yang telah memasukkan SBKU di level RO. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan pemantauan penggunaan SBKU pada tahun berjalan serta, jika memungkinkan, melakukan revisi anggaran antar RO yang di-tagging SBKU oleh Kementerian Keuangan;
- 18) Sistem penghubung layanan (SPL) dan aplikasi antar layanan UKE I yang belum terintegrasi telah dilakukan pengendalian melalui penyusunan Pedoman Interoperabilitas antar layanan SPBE. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan penerapan standar interoperabilitas yang sama antar layanan SPBE serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi interoperabilitas layanan SPBE;
- 19) Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib telah dilakukan pengendalian melalui penyusunan Pedoman Pengelolaan Aset TIK. Mitigasi risiko dilaksanakan dengan pelaksanaan inventarisasi kondisi aset TIK serta monitoring dan evaluasi daftar aset TIK;
- 20) Belanja TIK yang tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN RB telah dilakukan pengendalian melalui penyusunan SOP Pelaksanaan Clearance;
- 21) Capaian target yang belum maksimal telah dilakukan pengendalian melalui pengoptimalan penggunaan TIK untuk pencapaian kinerja serta evaluasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang bersifat strategis.

B. REALISASI ANGGARAN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, Kementerian Hukum terdampak efisiensi sebesar Rp. 561.272.869.000,- dengan pagu akhir sebesar Rp. 1.383.168.486.000,-. Berdasarkan data OM-SPAN per tanggal 7 Januari 2026, realisasi anggaran pada akhir tahun 2025, dengan pagu blokir sebesar Rp. 352.204.260.000,-, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025 sebesar Rp. 1.030.964.226.000,-. realisasi sebesar Rp 803.357.792.298,- atau 77,92% dari total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Pagu Blokir Rp. 352.204.260.000,-	Pagu Efektif Rp. 1.030.964.226.000,-	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	Rp. 1.490.164.878.000	Rp. 897.627.225.000			Rp. 670.311.925.893	Rp. 227.315.299.107	65,02%
Belanja Barang	Rp. 439.635.002.000	Rp. 470.899.786.000			Rp. 118.545.903.576	Rp. 352.353.882.424	11,50%
Belanja Modal	Rp. 14.641.475.000	Rp. 14.641.475.000			Rp. 14.499.962.829	Rp. 141.512.171	1,41%
Total	1.944.441.355.000	1.383.168.486.000			803.357.792.298	579.810.693.702	77,92%

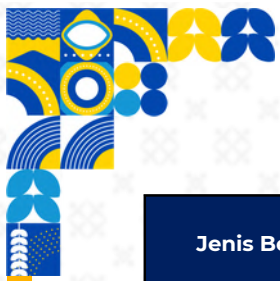
Tabel 3. 16 Anggaran dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2025



NO	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu				
		Efesiensi	Blokir	Pagu efektif	Real	%
1	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	48.815.809.000	43.599.457.000	5.216.352.000	5.204.094.748	99,77%
2	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	17.527.637.000	13.148.748.000	4.378.889.000	4.368.179.932	99,76%
3	Pengelolaan Program Anggaran Tatalaksana Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	20.042.648.000	10.694.577.000	9.348.071.000	9.311.182.333	99,61%
4	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum	14.582.360.000	11.886.244.000	2.696.116.000	2.661.176.990	98,70%
5	Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum	12.708.509.000	7.130.077.000	5.578.432.000	5.493.988.940	98,49%
6	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggan Kementerian Hukum	1.269.491.523.000	265.745.157.000	1.003.746.366.000	776.319.169.355	77,34%
Total		1.383.168.486.000	352.204.260.000	1.030.964.226.000	803.357.792.290	77,92%

Tabel 3. 17 Anggaran dan Realisasi per Jenis Kegiatan Tahun 2025





Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Tahun 2024				
Belanja Pegawai	Rp. 4.207.332.668.000	Rp. 4.203.421.513.193	Rp. 3.911.154.807	99,91%
Belanja Barang	Rp. 815.757.348.000	Rp. 789.763.095.935	Rp. 25.994.252.065	96,81%
Belanja Modal	Rp. 184.311.356.000	Rp. 181.332.358.205	Rp. 2,978.997.795	98,38%
Total	5.207.401.372.000	5.174.516.967.333	32.884.404.667	99,37%
Tahun 2025				
Belanja Pegawai	Rp. 897.627.225.000	Rp. 670.311.925.893	Rp. 227.315.299.107	65,02%
Belanja Barang	Rp. 470.899.786.000	Rp. 118.545.903.576	Rp. 352.353.882.424	11,50%
Belanja Modal	Rp. 14.641.475.000	Rp. 14.499.962.829	Rp. 141.512.171	1,41%
Total	1.383.168.486.000	803.357.792.298	579.810.693.702	77,92%

Tabel 3. 18 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2024 – 2025

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Monev Kemenkeu. Aplikasi Monev Kemenkeu dapat diakses melalui laman <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Kementerian Keuangan telah melakukan perubahan komposisi variabel penilaian monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri serta sistem penarikan hasil penilaian capaian kinerja anggaran, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran Lampiran III Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran K/L. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 2 Variabel yaitu:



Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	25
	2. Nilai Efektivitas Unit Eselon I	20
	3. Nilai Efektivitas Satker	30
Efisiensi 25	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Gambar 3.1 Komponen Penilaian pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-296/MK.02/2025 tanggal 26 April 2025 hal Penyampaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024, bahwa Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2024 memperoleh kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Hukum dan HAM telah berkualitas sesuai dengan tata Kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik (*good governance*), efektif, efisien dan akuntabel.

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum menerbitkan hasil Penilaian Kinerja Anggaran TA 2025. Namun, hasil sementara penginputan capaian Sekretariat Jenderal pada aplikasi Monev Kemenkeu sebagai berikut:

KEMENTERIAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM

Role

Pilih TA (2025)

Logout

NK Perencanaan KL

Monitoring / NK Perencanaan KL

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Carli

No.	Kode K/L	K/L	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas			Efisiensi	
				IKSS	IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	135	KEMENTERIAN HUKUM	97.04	99.40	100.00	99.60	77.04	97.40

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

KEMENTERIAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM

Role

Pilih TA (2025)

Logout

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Carli

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	01	SEKRETARIAT JENDERAL	96.12	100.00	99.96	67.52	95.90
2	02	INSPEKTORAT JENDERAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	03	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	99.37	100.00	100.00	95.74	98.65
4	04	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	98.56	100.00	99.77	87.50	99.45
5	05	DIREKTORAT JENDERAL KEKAWAHLAN INTELEKTUAL	96.62	100.00	99.01	76.81	95.90
6	11	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	99.46	100.00	99.72	97.67	98.80
7	12	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	98.90	100.00	100.00	90.24	99.15
8	13	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM	94.13	100.00	96.28	58.06	100.00

Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

KEMENTERIAN HUKUM KEMENTERIAN HUKUM

Role

Pilih TA (2025)

Logout

Gambar 3.2 Hasil Capaian pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Berikut gambar diatas merupakan hasil penginputan sementara per tanggal 10 Januari 2026. Dan hingga bulan Februari masih akan terus dilakukan proses penginputan.

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data Kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 10%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Capaian Output, bobot 25%.

Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Tahun 2025 per 10 Januari 2026 adalah **94,66**.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber: Ekspans - 10.01.2026

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	KEMENTERIAN HUKUM	Nilai	99.31	89.43	90.30	100.00	99.04	98.93	100.00	96.16	100%	0.90	94.66
			Dokur	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.93	12.61	18.06	10.00	9.96	9.36	25.00				
			Nilai Akhir	02.37			05.07			100.00				

Gambar 3.3 Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025

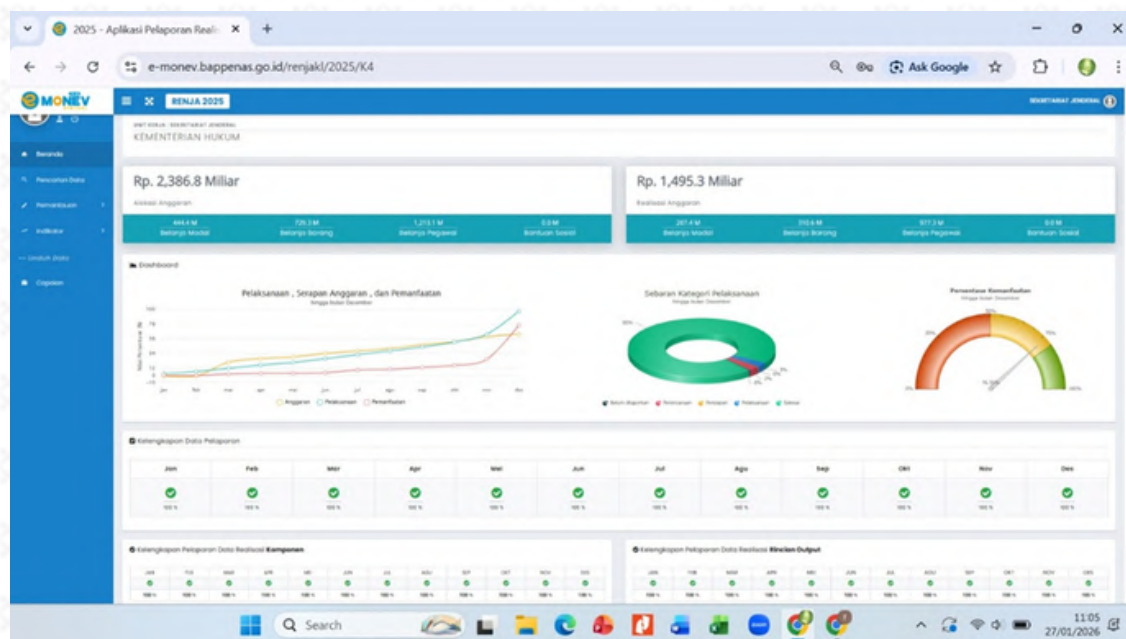
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. e-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Adapun capaian e-Monev Sekretariat Jenderal Tahun 2025 belum dapat dilakukan dikarenakan adanya kendala sistematis yang mengakibatkan adanya halangan penarikan data. Adapun progress per Kategori Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- Perencanaan : 22 %
- Persiapan : 10 %
- Pelaksanaan : 59 %
- Selesai : 5 %
- Kemanfaatan : 4 %

Pada Tahun 2025, Sekretariat Jenderal setiap bulan rutin melakukan penginputan capaian kinerja pada aplikasi e-Monev Bappenas yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 4 Capaian e-Monev Bappenas Tahun 2025

2. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Kementerian Hukum telah menyusun Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025. Sekretariat Jenderal juga rutin melakukan penginputan capaian rencana aksi pada aplikasi E-Performance yang dapat dilihat pada gambar berikut:

PERFORMANCE 2025

MONITORING CAPAIAN RENCANA AKSI

ESELON 1

#	Satker	Presentase Capaian RTL				Aksi
		B08	B09	B10	B11	
1	Sekretariat Jenderal					Rincian >
1.1	Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama			100%	100%	Rincian >
1.2	Biro Barang Milik Negara		100%	100%	100%	Rincian >
1.3	Biro Sumber Daya Manusia		0%		100%	Rincian >
1.4	Biro Keuangan	100%	100%	100%	100%	Rincian >
1.5	Biro Perencanaan dan Organisasi	100%	100%	100%	100%	Rincian >
1.6	Biro Umum		100%		100%	Rincian >
1.7	Pusat Data dan Teknologi Informasi	100%		100%		Rincian >

Gambar 3. 5 Capaian Rencana Aksi pada Aplikasi E-Performance Tahun 2025

Terkait Biro Sumber Daya Manusia yang capaiannya 0% dikarenakan terlambat dalam mengupload data dukung yang melewati batas waktu verifikasi. Terhadap hal ini, dilakukan monitoring dan pembinaan agar kedepannya seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat melaporkan capaian tepat waktu.

3. Aplikasi E-Performance

Aplikasi E-Performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Pada Tahun 2025, Sekretariat Jenderal juga rutin melakukan penginputan capaian perjanjian kinerja pada aplikasi E-Performance setiap bulan yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Bulan	Realisasi Target	Realisasi Pagu		Keterangan	Action
		Jumlah	Persentase		
Januari	0	Rp0.00	0.00%	1) Pelaporan ISS dan IKP Kemenkumham 2024 pada aplikasi monev Kemenkeu; 2) Pembahasan Usulan pagu Kemenkum 2026 bersama Unit eselon I, DIA dan Bappenas; 3) Penyusunan renja awal Kemenkum 2026; 4) Reviu Baseline Kemenkum 2026; 5) Usulan pagu Kemenkum 2026 sebagai masukan Kemenkeu dan Bappenas dalam menyusun pagu indikator 2026; 6) Usulan ABT 2025; 7) Melakukan efisiensi anggaran sesuai Inpres 1/2025;	
Februari	0	Rp0.00	0.00%	8) Penyusunan usulan Belanja Modal dan Belanja sewa Kanwil 2026; 9) Penyusunan postur anggaran kemenkum 2026; 10) Kick Off penyusunan renstra kemenkum 2025-2029; 11) Pemenuhan TIK Pusdatin 2025; 12) Melakukan penataan pelayanan publik Satker, melalui Penyusunan Standar Pelayanan, Maksud dan Tujuan, penyesuaian jam layanan dengan pola bekerja baru dan inventarisasi sarana prasarana pelayanan; 13) Menyusun SOP kembali dengan nomenklatur Kementerian Hukum; 14) Pendataan inovasi untuk dikompetisikan di tingkat nasional; 15) Pembangunan Zona Integritas Melalui WKB, WBBM;	

PERFORMANCE 2025

Beranda CAPAIAN KINERJA Sasaran Program Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI Rencana PK	Maret	0	Rp195.579.932.968,00	12,09%	Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) B03 Tahun 2025; 19) Persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025; 20) Monitoring dan Evaluasi Data Dukung Zona Integritas (ZI) pada aplikasi E-RB B03 Tahun 2025; 21) Penyusunan Rencana Aksi Nasional (Rencana Kerja Pemerintah) dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025; 22) Telah disusun, dipublish ke website, dan disampaikan ke Kementerian PAN-RB Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 serta Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024. Penyusunan Draft Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025 – 2029, sebagai acuan pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum; Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2025 melalui Virtual Zoom Meeting pada seluruh satuan kerja; Persiapan Evaluasi Mandiri Satuan Kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2025; Pendampingan Verifikasi dan Klarifikasi Hasil Penjaminan Kualitas atas Nilai PM SPIP bersama dengan Unit Eselon I Kementerian Hukum; Pembahasan Pengembangan Aplikasi SPIP dan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum bersama Inspektorat Jenderal; Penyusunan Draft Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2025	edit
	April	0	Rp0,00	0,00%	Penyusunan Draft Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025; Tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Semester I Tahun 2025; Tersusunnya Laporan Kinerja Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025; Tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025; Peremajaan Aplikasi Pengukuran Kinerja Organisasi (E-Performance) yang selanjutnya akan dilakukan integrasi dengan Aplikasi Pengukuran Kinerja Individu (SIMPEG); Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara berjenjang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; Penyusunan Konsep Survei Pemahaman Pegawai atas Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025; Penyusunan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang dilakukan secara berkala bersama APIP Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I; Pembahasan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Kementerian Hukum; Pemenuhan Data Dukung Monev SAKIP Sekretariat Jenderal, Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025; Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut AKIP Sekretariat Jenderal, Triwulan II Tahun 2025; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi UIC APH	edit

PERFORMANCE 2025

Beranda CAPAIAN KINERJA Sasaran Program Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI Rencana PK	Mei	0	Rp0,00	0,00%	Penyusunan Draft Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025; Tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Semester I Tahun 2025; Tersusunnya Laporan Kinerja Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025; Tersusunnya Laporan Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025; Peremajaan Aplikasi Pengukuran Kinerja Organisasi (E-Performance) yang selanjutnya akan dilakukan integrasi dengan Aplikasi Pengukuran Kinerja Individu (SIMPEG); Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara berjenjang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; Penyusunan Konsep Survei Pemahaman Pegawai atas Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025; Penyusunan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 yang dilakukan secara berkala bersama APIP Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I; Pembahasan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Kementerian Hukum; Pemenuhan Data Dukung Monev SAKIP Sekretariat Jenderal, Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025; Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut AKIP Sekretariat Jenderal, Triwulan II Tahun 2025; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi UIC APH	edit
--	-----	---	--------	-------	---	------

PERFORMANCE 2025

Beranda CAPAIAN KINERJA Sasaran Program Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI Rencana PK	Juni	0	Rp211.490.234.171,00	13,08%	Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di lingkungan Kementerian Hukum; Penyusunan modul SOP berbasis proses bisnis, modul manajemen pelayanan publik dan profil Kementerian Hukum; Penginputan realisasi dan capaian kinerja seluruh satuan kerja Kementerian Hukum pada aplikasi E-Performance setiap bulan; Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kementerian Hukum Semester I Tahun 2025; Pembentukan SK Tim Pembinaan Pelayanan Publik; Pelaksanaan Sosialisasi bersama ORI kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum perihal Evaluasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024; Pelaksanaan Sosialisasi terkait Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2025 kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum; Pelaksanaan seleksi internal terkait pengusulan inovasi yang akan dikusulkan KIPP 2025; Penguatan dan Penataan Kolaborasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum; Tindak Lanjut Analisis Penyusunan Kriteria Jabatan Manajerial di lingkungan Kementerian Hukum; Penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI telah diinput oleh seluruh Unit Eselon I Kementerian Hukum dengan nilai Kinerja Anggaran sebesar 7,86 sampai dengan Juli 2025; Fasilitas Usulan ABT Kementerian Hukum TA 2025; Fasilitas Usulan CBBW Kementerian Hukum TA 2025; Pelaksanaan	edit
--	------	---	----------------------	--------	--	------

PERFORMANCE 2025

Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Program

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Rencana PK

Juli

0

Rp0,00

0.00%

edit

Agustus

0

Rp0,00

0.00%

edit

Mini Menu

PERFORMANCE 2025

Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Program

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Rencana PK

September

0

Rp0,00

0.00%

edit

Mini Menu

PERFORMANCE 2025

Beranda

CAPAIAN KINERJA

Sasaran Program

Perjanjian Kinerja

RENCANA AKSI

Rencana PK

Oktober

0

Rp0,00

0.00%

edit

Mini Menu

- Pengemangan aplikasi e-performance pada Menu Percepatan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja; - Rapat Sinkronisasi Manajemen Risiko dengan Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029; - Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2025; - Persiapan Pelaksanaan Survei Pemahaman dan Kepedulian ASN terhadap Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu; - Supervisi Tindak Lanjut Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026 Kantor Wilayah Jambi, Kalimantan Barat, Kep. Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Papua, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tenggara, Bali, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah; - Penyusunan Bahan Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Hukum terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI

- Entry Meeting Evaluasi SPPP Kementerian Hukum Tahun 2025; - Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029; - Verifikasi Laporan Data Dukung Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Periode B06 Tahun 2025; - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sekolah Rakyat

- Rapat Perencanaan Pemenuhan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sekolah Unggul Garuda

Kependidikan (GTK) Sekolah Unggul Garuda (SUGAR); - Dialog Literasi mengenai Anggaran kolaborasi antara Ditjen Anggaran dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan; - Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Monitoring AKIP Sekretariat Jenderal, Triwulan III Tahun 2025; - Rapat Integrasi Aplikasi E-Performance dengan SIMPEG.

1. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum 2025 - 2029; 2. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2025; 3. Rapat Bimbingan Teknis Aplikasi E-RB dan E-Performance dengan Kementerian HAM; 4. Rapat Kegiatan Pengisian Matrik Pemantauan dan Evaluasi di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025; 5. Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B10 Tahun 2025; 6. Rapat Pembahasan Integrasi Penilaian Kinerja Organisasi pada E-Performance; 7. Rapat Persiapan Program Penyusunan Peraturan Menteri Hukum Tahun 2026; 8. Rapat Perumusan Perjanjian Kerja Sama Replikasi Aplikasi E-RB dan Aplikasi E-Performance dengan Kementerian HAM; "1. Supervisi Tindak Lanjut Penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026 Kanwil Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat; 2. Persiapan Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran

Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Gorontalo 14. Pengisian Formulir Monitoring Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 15. Rapat Pelaksanaan Uji Coba SIM Online 16. Tindak Lanjut PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri Tindak Lanjut PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri "1. Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Finalisasi input dokumen SOP Biroreano pada aplikasi e-SOP 3. Validasi Standar Operasional Prosedur Ditjen AHU 4. Verifikasi dokumen SOP Biro Hukum pada Aplikasi E-SOP 5. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang Jabatan dan Kelas Jabatan 6. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum 7. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang Pakan Dinas di lingkungan Kementerian Hukum 8. Penyusunan draft Naskah Urgensi dan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum 9. Rapat Penyusunan Proses Bisnis Level I Kemenkum 10. Verifikasi Dokumen SOP pada Biro Umum dan Biro SDM 11. Menyusun inventarisasi usulan penataan Organisasi Kementerian Hukum pada Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Hukum 12. Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan



PERFORMANCE 2025					
Beranda CAPAIAN KINERJA Sasaran Program Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI Rencana PK					
Beranda CAPAIAN KINERJA Sasaran Program Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI Rencana PK	November	0	Rp0,00	0.00%	PEKPPP Mandiri Satker 9. Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Karwil Papua Barat, Jawa Barat, Papua, Badiklat Kepulauan Riau 10. Rapat Konfirmasi Plotting Project Aplikasi SKM Tahun 2025 11. Sosialisasi Monitoring Penyelenggaraan Pembinaan Yandik Kelompok Rentan 12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Karwil Lampung dan Sumatera Barat 13. Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Gorontalo 14. Pengisian Formulir Monitoring Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 15. Rapat Pelaksanaan Uji Coba SIM Online 16. Tindak Lanjut PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri Tindak Lanjut PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri 17. Melakukan rekap rekomendasi hasil self assesment PEKPPP mandiri pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkum 18. Rapat Tindak Lanjut Hasil PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri dengan Kementerian PANRB 19. Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Uji Coba SKM Online" "1. Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Finalisasi input dokumen SOP Biroreno pada aplikasi e-SOP 3. Validasi Standar Operasional Prosedur Ditjen AHU 4. Verifikasi dokumen SOP Biro Hukerma pada Aplikasi E-SOP 5. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang Jabatan dan Kelas Jabatan 6. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang
Beranda CAPAIAN KINERJA Sasaran Program Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI Rencana PK	Desember	0	Rp803.357.792.298,00	77.92%	Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Gorontalo 14. Pengisian Formulir Monitoring Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 15. Rapat Pelaksanaan Uji Coba SIM Online 16. Tindak Lanjut PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri Tindak Lanjut PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri 17. Melakukan rekap rekomendasi hasil self assesment PEKPPP mandiri pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkum 18. Rapat Tindak Lanjut Hasil PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri dengan Kementerian PANRB 19. Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Uji Coba SKM Online 20. Kompilasi data Organisasi Penyelenggara Pelayanan & Jenis layanan untuk disampaikan ke KemenPANRB" "1. Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Finalisasi input dokumen SOP Biroreno pada aplikasi e-SOP 3. Validasi Standar Operasional Prosedur Ditjen AHU 4. Verifikasi dokumen SOP Biro Hukerma pada Aplikasi E-SOP 5. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang Jabatan dan Kelas Jabatan 6. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum 7. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Hukum 8. Penyusunan draft Naskah Urgensi dan
Beranda CAPAIAN KINERJA Sasaran Program Perjanjian Kinerja RENCANA AKSI Rencana PK	Desember	0	Rp803.357.792.298,00	77.92%	Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Bali, Gorontalo 14. Pengisian Formulir Monitoring Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 15. Rapat Pelaksanaan Uji Coba SIM Online 16. Tindak Lanjut PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri Tindak Lanjut PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri 17. Melakukan rekap rekomendasi hasil self assesment PEKPPP mandiri pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkum 18. Rapat Tindak Lanjut Hasil PEKPPP Nasional & PEKPPP Mandiri dengan Kementerian PANRB 19. Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Uji Coba SKM Online 20. Kompilasi data Organisasi Penyelenggara Pelayanan & Jenis Layanan untuk disampaikan ke KemenPANRB" "1. Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Finalisasi input dokumen SOP Biroreno pada aplikasi e-SOP 3. Validasi Standar Operasional Prosedur Ditjen AHU 4. Verifikasi dokumen SOP Biro Hukerma pada Aplikasi E-SOP 5. Rapat Pembahasan RaPermenkum tentang Jabatan dan Kelas Jabatan 6. Rapat Pembahasan

Gambar 3. 6 Capaian Perjanjian Kinerja pada Aplikasi E-Performance Tahun 2025





E. EFISIENSI SUMBER DAYA

1. Anggaran

Efisiensi anggaran selalu menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Bahwa semakin sedikit anggaran yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan efisien. Tetapi dalam menentukan efisiensi harus menggunakan alat ukur yang sudah mempunyai formulasi perhitungan dalam berbagai aspek. Untuk pengukuran Nilai Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Unit Sekretariat Jenderal tahun 2025, digunakan data pada Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan perubahan komposisi variabel penilaian monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri serta sistem penarikan hasil penilaian capaian kinerja anggaran, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran Lampiran III Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran K/L. Hal.35. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 2 Variabel yaitu:

- Variabel Efektivitas, bobot 60%
- Variabel Efisiensi, bobot 40%

Pada Tahun 2025, pagu anggaran awal untuk Sekretariat Jenderal sebesar **Rp. 1.944.441.355.000,-** yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 1 (satu) Sasaran Program dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Program. Berdasarkan Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, Kementerian Hukum terdampak sebesar Rp. 561.272.869.000,- dengan pagu akhir sebesar Rp. 1.383.168.486.000,-. Berdasarkan data OM-SPAN per tanggal 7 Januari 2026, realisasi anggaran pada akhir tahun 2025, dengan pagu blokir sebesar Rp. 352.204.260.000,-, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025 sebesar Rp. 1.030.964.226.000,-. Berdasarkan angka realisasi anggaran sebesar **Rp 803.357.792.298,-** atau **77,92%**, maka dapat dipastikan telah dilakukan efisiensi anggaran yang digunakan dalam mencapai target yang direncanakan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum pada umumnya dan mewujudkan program kerja Presiden Republik Indonesia pada khususnya. Sumber daya manusia merupakan aset dan juga dapat berfungsi sebagai modal non finansial di dalam tubuh organisasi untuk mewujudkan potensi dan eksistensi nyata Kementerian Hukum. Dampak revolusi industri 4.0 dalam perubahan proses bisnis semakin dirasakan, terutama terkait penyederhanaan proses bisnis yang diberlakukan dengan skala yang lebih luas dan dioptimalkan.





Hal ini berdampak pada potensi penurunan beban kerja yang berimbas pada optimalisasi dan efisiensi pegawai. Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM dari internal

Optimalisasi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia terus dilakukan dengan pengembangan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Dengan dilakukannya pengembangan SDM, diharapkan terjadi peningkatan kinerja organisasi dengan memaksimalkan kinerja pegawai melalui efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kualitas kerja. Adapun program pengembangan SDM yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan, antara lain:

a. Pelatihan Teknis

1. Pelatihan Penguatan Substansi Kakayaan Intelektual : 733 orang;
2. Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pimpinan Tinggi: 177 orang;
3. Pelatihan Teknis Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Bagi Kepala Divisi : 98 orang;
4. Bimbingan Teknis Pengolahan Data Evaluasi Pelatihan : 40 orang;
5. Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) : 43 orang;
6. Pelatihan Teknis Dasar Pemeriksaan Merek : 69 orang;
7. Pelatihan Pengawas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) : 25 orang;
8. *Training of Facilitator* Implementasi KUHP : 159 orang;
9. Pelatihan Keprotokolan : 44 orang;
10. Pelatihan Fidusia : 141 orang;
11. Pelatihan Indikasi Geografis : 200 orang;
12. Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) : 193 orang;
13. *Certified Government Risk Executive* (CGRE) : 3 orang;
14. *Certified Government Chief Audit Executive* (CGCAE) : 1 orang;
15. Pelatihan Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha : 32 orang;
16. Pelatihan Transformasi Digital : 37 orang;
17. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil : 418 orang;
18. Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 671 orang;
19. Pelatihan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 229 orang;
20. Pelatihan *Public Speaking* : 40 orang;

b. Pelatihan Struktural

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I : 5 orang;
2. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II : 38 orang;
3. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) : 40 orang;
4. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) : 40 orang.



c. Pelatihan Fungsional

1. Penyuluh Hukum Ahli Pertama: 60 orang;
2. Kurator Keperdataan Ahli Pertama: 51 orang;
3. Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama: 25 orang;
4. Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama: 60 orang;
5. Analis Hukum Ahli Pertama: 60 orang;
6. Analis Hukum Ahli Muda: 61 orang.

2) Pengembangan Kompetensi melalui Tugas Belajar (TuBel), antara lain:

- a. TuBel Dalam Negeri S1/D4: 21 orang, S2: 25 orang, S3: 4 orang;
- b. TuBel Dalam Negeri S1/D4: 0, S2: 7 orang, S3: 3 orang.

b. Pengendalian Pertumbuhan Pegawai

Dalam pengelolaan ASN, dilakukan perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM dihitung dengan mempertimbangkan antara lain kebijakan nasional terkait pengadaan ASN, sasaran kinerja dan prioritas program unggulan, restrukturisasi organisasi, kompetensi inti yang dibutuhkan organisasi, jumlah pegawai yang akan berhenti, pertimbangan komposisi SDM, ketersediaan calon pelamar di pasar tenaga kerja, serta jalur pemenuhan pegawai. Pada Tahun 2025, jumlah SDM Sekretariat Jenderal sebanyak 756 pegawai. Jika dibandingkan dengan jumlah SDM tahun sebelumnya sebesar 871 pegawai, maka terjadi penurunan jumlah SDM sebanyak 115 pegawai atau menurun sebesar -13,20%. Pengurangan jumlah pegawai ini masih pada batas wajar mengingat terjadi pergerakan pegawai dalam mengatasi kompleksitas transformasi organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Hukum. Dan walaupun terjadi penurunan jumlah SDM, tidak mengurangi pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal.

3. Teknologi Informasi

Sebagai respon terhadap tata kelola pemerintahan yang digital, Sekretariat Jenderal telah melakukan serangkaian transformasi dalam rangka penerapan e-government dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diantaranya:

- a. Aplikasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) dalam rangka pengelolaan persuratan;
- b. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian dalam rangka pengelolaan kepegawaian;
- c. Aplikasi e-RB dalam rangka Pelaksanaan Penilaian/Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. Aplikasi e-Performance dalam rangka mengukur kinerja organisasi secara periodik;
- e. Sistem Informasi Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum;
- f. Aplikasi e-SDM menggantikan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dalam rangka mengelola dan mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian;
- g. Aplikasi e-SOP merupakan aplikasi yang memungkinkan pegawai dan masyarakat untuk mengakses Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk berbagai tugas dan fungsi layanan di Kementerian Hukum;





- h. Pendaftaran pelayanan kesehatan di Balkesmas secara online melalui link balkesmas.kemenum.go.id sehingga pegawai yang ingin mendapat pelayanan kesehatan dapat terkoordinasi satu pintu pelayanan;
- i. Aplikasi e-Rumga dalam rangka pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal untuk peminjaman ruang rapat, penggunaan Wisma Pengayoman, penggunaan Graha Pengayoman dan pelaporan online hemat energi Kantor Wilayah.

Adapun efisiensi yang dirasakan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi di Sekretariat Jenderal diantaranya:

- a. Memupuk percepatan pembentukan budaya digital dalam rangka e-government;
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan lebih baik, transparan, efisien dan efektif;
- c. Menyederhanakan birokrasi sehingga dapat mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas; dan
- d. Mendukung budaya paperless sehingga terdapat efisiensi sumber daya dan biaya pengantaran naskah dinas atau dokumen.



BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN



B. SARAN



Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 merupakan wujud sinergi dan kerja sama seluruh jajaran. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders dan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal di tahun yang akan datang.

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025 disusun sebagai refleksi keberhasilan ataupun bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal terkait Program Dukungan Manajemen;
2. Perencanaan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 tanggal 10 Oktober 2025 yang di dalamnya tertuang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja dan kerangka pendanaan dan juga telah ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025;
3. Sepanjang tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Jenderal, 80% target Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 7 Januari 2025 telah tercapai, sementara berdasarkan Perjanjian Kinerja 23 Oktober 2025 tercapai sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai diatas 100% meskipun masih terdapat target yang belum ada hasil capaian dikarenakan masih dalam proses penilaian oleh instansi eksternal;
4. Walaupun pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal mengalami efisiensi anggaran yang cukup besar, namun Sekretariat Jenderal mampu mencapai sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal Tahun 2025 sebesar 94,66 ;
5. Pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. SARAN

Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja, upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi dan mendorong peningkatan kinerja serta menghadapi tantangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum sebagai instansi kedepannya:

1. Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan peningkatan kinerja;
2. Fokus dalam penyelesaian isu Reformasi Birokrasi dengan mengoptimalkan transformasi birokrasi digital terutama Reformasi Birokrasi General yang menjadi fokus kinerja Sekretariat Jenderal;
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk lebih meningkatkan Nilai IKPA satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum;
4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi data laporan keuangan, dan monitoring evaluasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dalam rangka pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum;
5. Penguatan fungsi pembinaan dan koordinasi Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama ke semua lini Kementerian Hukum, mulai dari Unit Utama, Kantor Wilayah, sampai Unit Pelaksana Teknis.





LAMPIRAN



**PENGHARGAAN/
PRESTASI**



**PERJANJIAN
KINERJA**





20 Februari 2025

**Kementerian Hukum mendapatkan Peringkat Pertama
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 oleh
Kementerian Keuangan**



26 September 2025

**Penghargaan dalam Kegiatan Uji Coba Instrumen Pengukuran Kualitas Data
dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data Tertinggi Kategori A sebesar
89.62% oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara**



26 Juni 2025
Kementerian Hukum Penghargaan Kematangan UKPBJ
Level 3 Proaktif dari LKPP



3 Oktober 2025
Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024
oleh BPK RI (WTP ke 16 kali)





29 Oktober 2025

Kementerian Hukum menerima Penghargaan dari ANRI atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Terjaga untuk Melindungi Eksistensi Bangsa dan Negara



13 November 2025

Kementerian Hukum meraih juara pertama atau penghargaan Terbaik I pada kategori Media Sosial Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2025.

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS JENDERAL (JAN– OKT)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Supratman Andi Agtas
Jabatan : Menteri Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum

Supratman Andi Agtas

Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 2.998.606.225.000,-
1.	Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum	Rp. 11.864.109.000,-
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	Rp. 48.627.269.000,-
3.	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	Rp. 16.299.833.000,-
4.	Pengelolaan Program, Anggaran, Tatalaksana, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum	Rp. 18.759.408.000,-
5.	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum	Rp. 14.019.560.000,-
6.	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	Rp. 1.834.871.176.000,-
7.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp. 998.015.494.000,-
8.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum	Rp. 56.149.376.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum

Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS JENDERAL (NOV – DES)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Supratman Andi Agtas
Jabatan : Menteri Hukum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum

Supratman Andi Agtas

Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38 Indeks

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp.2.948.043.080.000,-
1.	Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama	Rp.12.344.109.000,-
2.	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum	Rp.48.627.269.000,-
3.	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum	Rp.17.417.637.000,-
4.	Perencanaan dan Organisasi	Rp.20.638.188.000,-
5.	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum	Rp.14.649.760.000,-
6.	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum	Rp.1.832.259.211.000,-
7.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum	Rp.169.934.965.000,-
8.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp.832.171.941.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum

Supratman Andi Agtas

Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta



SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

**JL. H. R. RASUNA SAID NO.KAV. 6, RT.16/RW.7, KUNINGAN, KOTA JAKARTA SELATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12940**